LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TA. 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Laporan Kinerja Triwulan II TA. 2023. Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Renstra BPBD menjadi dokumen acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan unit kerja BPBD pada periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam Renstra BPBD Kab. Luwu Timur, dijabarkan dalam satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah. Dalam pencapaian sasaran perlu menyesuaikan dan mempertimbangan tantangan-tantangan yang ada dalam pencapaian target agar pelaksanaan berjalan lebih efektif dan efisien.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Triwulanan Instansi Pemerintah yang berisi tentang prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan merupakan kewajiban setiap SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan program dan kegiatan ditahun mendatang.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Triwulanan ini disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan tersebut, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Malili. 10 Juli 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA,

MASDIN, AP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19730315 199311 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

VISI

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

MISI

MISI Ke- 3 RPJMD

"Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas"

MISI Ke- 4 RPJMD

"Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan pablik yang lebih baik"

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	NOTIFIKASI	CAPAIAN KINERJA
	Tercapai ■ Tidak Tercapai ■	
I. Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	→	1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) = 0,44 (97,77%)
II. Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	→	1. Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana = 84,12 % 2. Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota = 97,27 %
a. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	→	1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 66,53 %
b. Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan	→	2. Persentase warga negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapsiagaan terhadap bencana = 100%
c. Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi	→	3. Persentase warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%

d. **Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai**	1. **Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar = 92,41%**
1. Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang	1. **Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 0,08%**
2. Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan pemerintah dan warganegara untuk mengurangi dampak	1. **Cakupan warga negara yang meperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiapsiagaan terhadap bencana = 0%**
3. Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin bencana	1. **Persentase warga negara yang meperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender = 100%**
4. Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	1. **Cakupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan = 100%**
5. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat	1. **Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu = 100%**
6. Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	1. **Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik = 87,50%**
7. Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1. **Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar = 100%**
8. Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	1. **Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah = 150%**
9. Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	1. **Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah = 101,9%**
10. Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	1. **Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi = 60%**
11. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. **Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah = 91,83%**
12. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	1. **Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik = 108,97%**

DAFTAR ISI

hal.

KATA PENGANTAR ..... *i*

DAFTAR ISI ..... *iv*

DAFTAR TABEL ..... *v*

DAFTAR GAMBAR ..... *vii*

DAFTAR GRAFIK ..... *viii*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi 1
1.2 Struktur Organisasi 1
1.3 Aspek Strategis Organisasi 4
1.4 Isu Strategis/Permasalahan 6
1.5 Sistematika Laporan 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Target Kinerja tahun 2021-2026 9
1. Visi dan Misi 10
2. Indikator Kinerja Sasaran 10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 16
3.2 Analis Capaian Kinerja 17

BAB IV PENUTUP 108

DAFTAR TABEL

hal.

Tabel 1	Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026	12
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	13
Tabel 3	Program dan Pagu Anggaran Tahun 2023	14
Tabel 4	Tingkat Akuntabilitas Kinerja	16
Tabel 5	Pengukuran Capaian Kinerja	17
Tabel 6	Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke- 1	18
Tabel 7	Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2023	23
Tabel 8	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	27
Tabel 9	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 10	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	28
Tabel 11	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)	30
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	34
Tabel 13	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)	34
Tabel 14	Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	36
Tabel 15	Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakatrakat	36
Tabel 16	Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	38
Tabel 17	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	42
Tabel 18	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	45
Tabel 19	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	50
Tabel 20	Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	54
Tabel 21	Capaian Indikator Kinerja Sasaran	62
Tabel 22	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	65
Tabel 23	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	65
Tabel 24	Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	66
Tabel 25	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)	67

Tabel 26 Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung 67
Tabel 27 Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022 97
Tabel 28 Permasalahan dan Solusi 99

DAFTAR GAMBAR

hal.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 3

DAFTAR GRAFIK

		hal.
Grafik 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ...	2
Grafik 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.....	2
Grafik 3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan II Tahun2023.....	18
Grafik 4	Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2023	23
Grafik 5	Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Triwulan II Tahun 2023.....	30
Grafik 6	Capaian Kinerja Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2023.....	39
Grafik 7	Perbandingan Capaian Program Penanggulangan Bencana Triwulan I dengan Triwulan II TA. 2023	40
Grafik 8	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I & II TA. 2023.....	43
Grafik 9	Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I & II TA. 2023.....	44
Grafik 10	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	46
Grafik 11	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	47
Grafik 12	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	47
Grafik 13	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	48
Grafik 14	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	49
Grafik 15	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	49
Grafik 16	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	50
Grafik 17	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	57
Grafik 18	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	52
Grafik 19	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	52
Grafik 20	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023	55

Grafik 21 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 57
Grafik 22 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 58
Grafik 23 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 60
Grafik 24 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 61
Grafik 25 Data Kejadian Bencana Januari s.d Juni Tahun 2023 62
Grafik 26 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 71
Grafik 27 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 72
Grafik 28 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 73
Grafik 29 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 74
Grafik 30 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 74
Grafik 31 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 75
Grafik 32 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 76
Grafik 33 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 77
Grafik 34 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 78
Grafik 35 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 79
Grafik 36 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 79
Grafik 37 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 80
Grafik 38 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 81
Grafik 39 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 82
Grafik 40 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 82
Grafik 41 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 83
Grafik 42 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 84
Grafik 43 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 84
Grafik 44 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 85
Grafik 45 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 86
Grafik 46 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 86
Grafik 47 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 87

Grafik 48 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 88
Grafik 49 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 88
Grafik 50 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 89
Grafik 51 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 89
Grafik 52 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 90
Grafik 53 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 91
Grafik 54 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 91
Grafik 55 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 92
Grafik 56 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 93
Grafik 57 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 94
Grafik 58 Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023 95
Grafik 59 Realisasi Anggaran Triwulan II TA. 2023 96

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officcio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas : membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah,

Fungsi :
- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 74 Tahun 2021.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, berdasarkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 40 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 13 orang dan Tenaga Upah Jasa 27 orang (Tenaga Administrasi 1 orang, Cleaning Service 1 orang, Sopir 1 orang dan Tim Reaksi Cepat 24 orang). Struktur tingkat pendidikan SDM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :

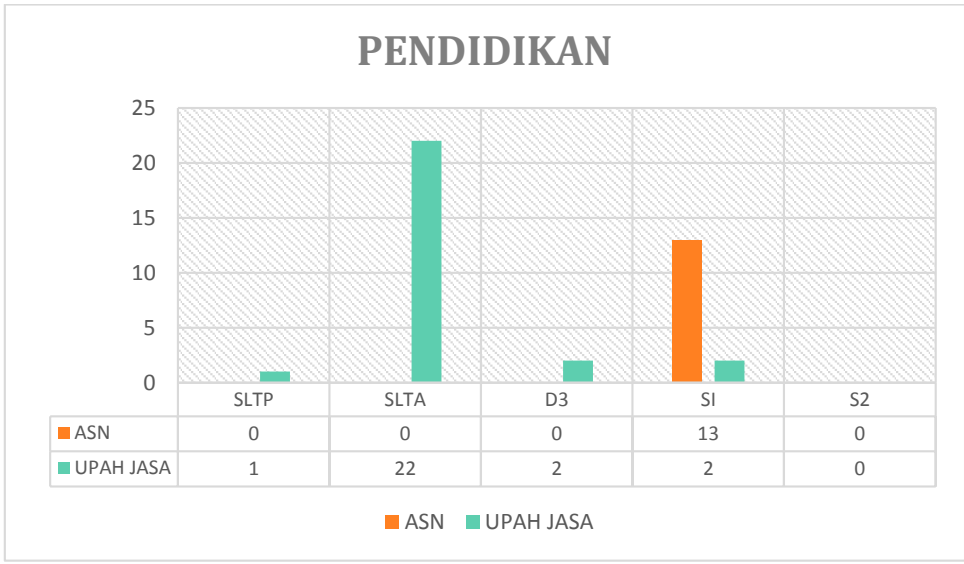

Grafik. 1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

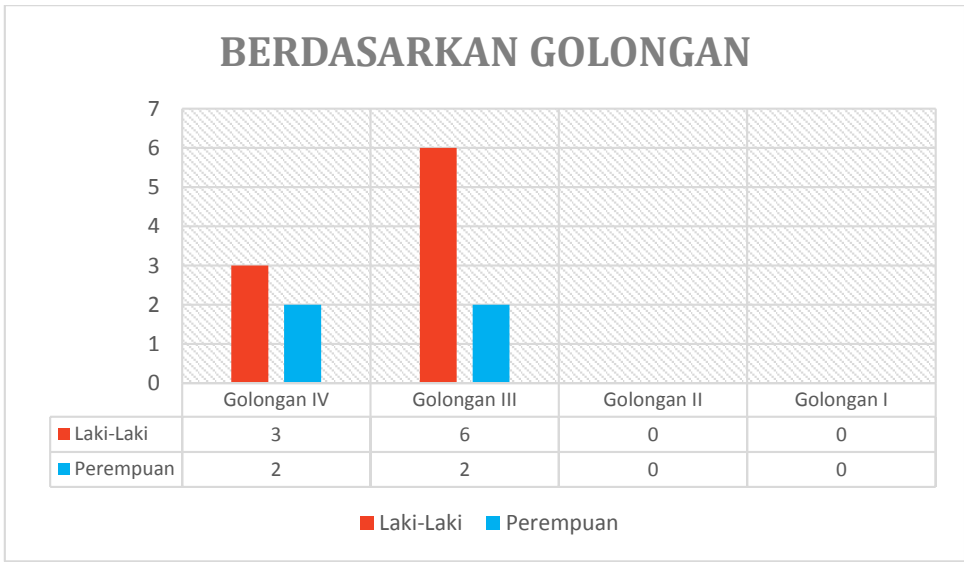

Grafik. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

Gambar 1
Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2023

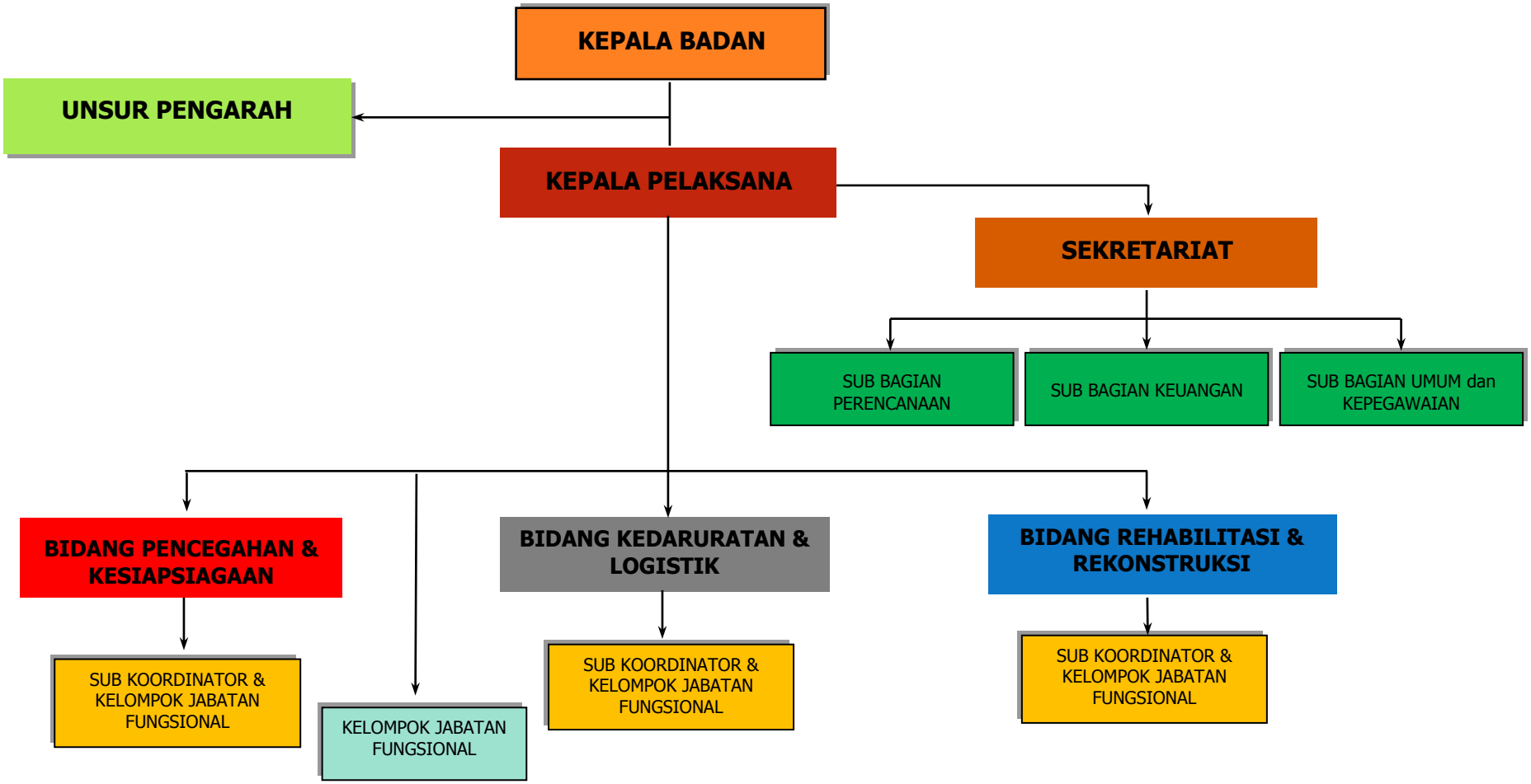

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan **Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana** (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan **Satuan Pelaksana Penanganan Bencana** (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan bencana. Undang-Undang atau Peraturan ini dibuat sebagai payung hukum mengenai proses penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang ini dimulai dari prabencana, pada saat bencana hingga proses pemulihan pasca bencana diatur di dalamnya. BNPB dan BPBD dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru.Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko serta penanganan korban. Kinerja organisasi merupakan salah satu sorotan yang paling tajam dalam pelaksanaan pemerintahan menyangkut kesiapan, jumlah pendidikan dan profesionalisme. BPBD Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dalam penanganan bencana dibutuhkan kesiagaan dan kecepatan seluruh unsur aparat dari berbagai instansi tanpa terkecuali. Sehingga ketika bencana tiba sudah tidak perlu birokrasi adminitrasi, koordinasi dan himbauan lagi. Akan tetapi yang terpenting adalah aparat akan bisa hadir dengan cepat di tengah masyarakat ketika bencana terjadi hal itulah yang perlu dibenahi dari sekarang dan itu menjadi tugas BPBD yang bukan hanya sekedar menanggulangi saat terjadi bencana namun juga melakukan koordinasi mulai dari sebelum terjadi bencana, sampai pasca bencan

1.4 ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 telah diatur tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur antara lain membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana dengan memberikan dukungan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Luwu Timur mendukung dan mewujudkan tercapainya sasaran strategis Daerah Kabupaten Luwu Timur yaitu ***"Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)"***. Namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur masih terdapat permasalahan antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal pada sub urusan bencana;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada meningkatnya kejadian bencana setiap tahun
4. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
5. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana
6. Belum optimalnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana
7. Belum optimalnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif
8. Belum optimalnya Upaya pemulihan pasca bencana
9. Masih Kurangnya sumber daya logistik dan peralatan
10. Belum optimalnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor
11. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana

1.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Triwulanan ini pada dasarnya adalah suatu media untuk mengkomunikasikan capaian kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa datang. Artinya, terhadap capaian yang telah mencapai atau melebihi target (sudah baik) agar tetap dipertahankan, sedangkan terhadap capaian kinerja yang masih di bawah target untuk masa mendatang dapat dilakukan perbaikan melalui strategi-strategi yang lebih baik.

Memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan dengan bagan sebagai berikut :

Referensi Bab

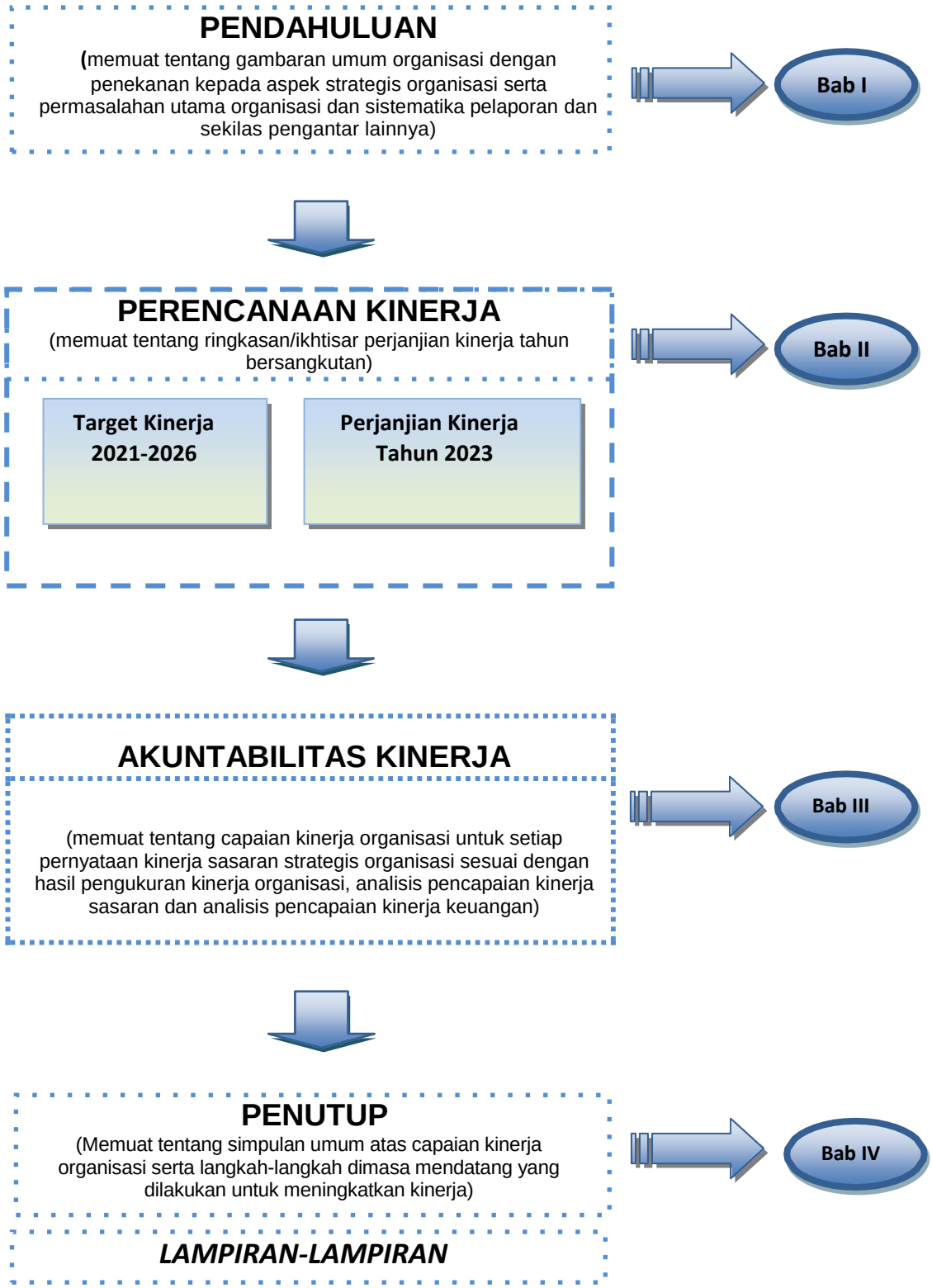

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas selalu menjadi perhatian utama setiap perangkat daerah, termasuk BPBD. Peningkatan ini terlihat dari penajaman program pada Renstra 2021– 2026.

Program pada Renstra BPBD periode 2021-2021 berbeda dari Renstra periode sebelumnya yaitu diselaraskan dengan Program Nasional yang berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana dan disesuaikan juga dengan Program Prioritas (KP1) Kepala Daerah. Berdasarkan Renstra BPBD 2021-2026, mencakup satu sasaran utama yaitu Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana, Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana dan sasaran pendukung yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2021-2026

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur. Hal ini merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengarahkan sumber daya BPBD dalam mewujudkan peran BPBP sebagai pelaku utama dalam penanggulangan bencana dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menyelenggarakan dua fungsi utama yaitu Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Fungsi tersebut diformulasikan ke dalam tujuan dan sasaran BPBD dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD 2021-2026. Visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2026 atau setelahnya dan misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang, dengan kata lain visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"

2. Pernyataan Misi

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur yaitu

MISI Ke- 3 RPJMD

"Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas"

Sasaran 7 RPJMD

"Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana"

MISI Ke- 4 RPJMD

“Menciptakan kepemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”

Sasaran 9 RPJMD

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”

3. Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik dan dapat terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun hubungan antara tujuan, sasaran, Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam RENSTRA yang berkaitan dengan Visi dan Misi yang diemban oleh BPBD Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Kondisi Awal 2020	Target Kinerja Sasaran						Kondisi Akhir 2026
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Menurunkan risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	202	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0.47	0,50	0,50
2.	Meningkatkan penyelenggaraan SPM sub urusan bencana	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	90	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	-	100	100	100	100	100	100	100
					Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	90	95	95	95	97	98	100	100

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran kegiatan dalam hal ini melalui pengukuran indikator kinerja kegiatan. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis, di tahun 2023 disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran kegiatan, kegiatan, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja yang ada dalam perjanjian menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran sesuai indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2023 yang merupakan kesanggupan untuk melaksanakan kinerja, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,45 (sedang)
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%
		Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar **Rp. 4.565.959.550,-** *(Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah),* terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.113.296.135,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.194.333.415**,- dan belanja modal **Rp 258.330.000,-.**

Adapun program dan anggaran secara lengkap disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.
Program dan Pagu Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.005.325.018,-	APBD
2	Program Penanggulangan Bencana	1.560.634.532,-	APBD
JUMLAH		**4.565.959.550,-**	

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dikatakan mampu mengkomunikasikan capaian kinerja unit kerja secara jujur, objektif, akurat dan transparan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, apabila dalam penyajiannya memenuhi prinsip-prinsip dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu ***pertama***, Prinsip Lingkup Pertanggungjawaban, yang mengandung pengertian bahwa hal-hal yang dilaporkan harus proporsional dengan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dan memuat baik mengenai kegagalan maupun keberhasilan, ***kedua***, Prinsip Prioritas, yang mengandung pengertian bahwa yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya, ***ketiga***, Prinsip Manfaat, yang mengandung pengertian bahwa manfaat laporan harus lebih besar daripada biaya penyusunannya dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan kewajiban dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 digunakan untuk mengetahui keberhasilannya dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang

digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Luwu Timur dengan Bupati Luwu Timur. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel. 4
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 5
Pengukuran Capaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI S/D TW II TA. 2023	CAPAIAN (%)	NOTIFIKASI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,45 %	0,44 %	97,77	🔴
2.	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100	84,12	84,12	🔴
		Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	92,41%	97,27	🔴

Keterangan : 🟢 Mencapai/Melampui Target ; 🔴 Belum Mencapai Target

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Sasaran Strategis I
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana

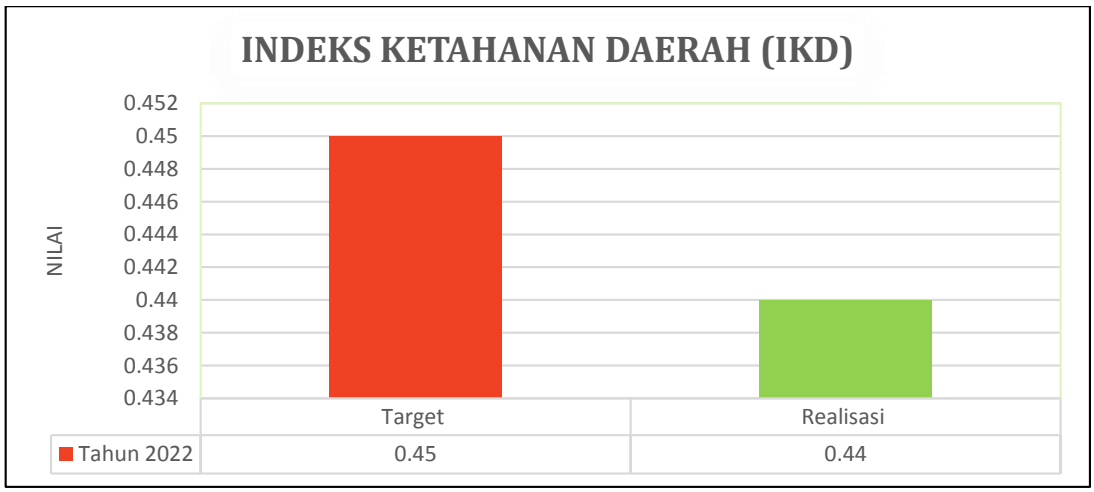

Grafik. 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan II Tahun 2023

Tabel. 6
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke -1

Sasaran I :	**Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana**		
Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,44	97,77%

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

- **Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : ***"Nilai Indeks Ketahanan Daerah"***

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Luwu Timur adalah Indeks Ketahanan Daerah dengan target tahun 2023 adalah 0,45 dan realisasi sampai dengan Triwulan II TA. 2023 sebesar 0,44 dengan persentase capaian kinerja 97,77%. Realisasi yang belum tercapai karena pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilaksanakan pada Bulan Nopember 2023 dan dilakukan verifikasi pada Bulan

Desember 2023 oleh BNPB sehingga capaiannya masih berdasarkan hasil penilaian IKD Tahun sebelumnya.

Capaian target tersebut diperoleh dari pengimputan Tools 71 Indikator berdasarkan baseline data 2018-2022 yang dimutakhirkan setiap tahun, dan data tersebut bersumber dari OPD terkait seperti Bappelitbangda, Dinas PU & PR, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan, DLH, Satpol PP, DAMKAR, TNI/POLRI dsb.

Pengumpulan hasil penilaian IKD dilakukan melalui inaRISK yaitu suatu platform yang digunakan untuk penilaian kapasitas daerah secara mandiri melalui daring. Hasil IKD nantinya tersimpan dalam server dan dapat diakses kembali oleh masing-masing daerah sehingga ini memudahkan proses pengarsipan dan pemutakhiran nilai IKD.

Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. **INDEKS KETAHANAN DAERAH (IKD)** merupakan bagian **dari perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).** IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. **IKD** aspek penting: merupakan komponen pada **kajian kapasitas** di dalam KRB **data input** dalam **perhitungan IRBI.** Penilaian IKD dilakukan dengan mekanisme ‘pemutakhiran’ bukan pengisian dari awal. Hasil penilaian akan diverifikasi oleh Provinsi dan BNPB, sehingga nilai bisa berubah. Nilai IKD yang baik adalah yang selalu meningkat, sehingga baseline yang rendah pun tidak masalah

Salah satu strategi dalam menurunkan Indeks Risiko Bencana adalah peningkatan kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten, kota dan propinsi.

Dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah terdapat 71 indikator yang dipedomani dengan 7 program prioritas yaitu : Penguatan kelembagaan dan kebijakan, Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana**.**

Adapun hasil dari penilaian indeks kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Penguatan kelembagaan dan kebijakan, yaitu :

- Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
- Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2021 tentang SOTK BPBD
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kab. Luwu Timur 2011-2031
- Rencana Detail Tata Ruang 2015-2025
- Rencana Detail Tata Ruang Wotu, Malili, Wasuponda, Towuti, Mangkutana, Tomoni dan Tomoni Timur
- Perda Nomor 7 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2010 tentang bangunan Gedung
- Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana
- Perbup BTT Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran , pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga
- Perbup Nomor 34 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- SK Kepala Dinas Kesehatan Nomor 094/Dinkes/115/XI/2022 tentang Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana
- SK Bupati Luwu Timur Nomor 180/VII/Tahun 2018 tentang SOP Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, yaitu :
   - Dokumen Kajian Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
   - Peta Bahaya/Peta Risiko Bencana Kab. Luwu Timur
   - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Luwu Timur
3. Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, yaitu :
   - PUSDALOPS BPBD
   - Pelatihan Penanggulangan Bencana setiap tahun
   - Gladi Penanggulangan Bencana setiap tahun
   - Pengadaan kebutuhan logistik dan peralatan bencana setiap tahun
   - Penyimpanan/Gudang Logistik BPBD

- Pemeliharaan peralatan dan suplay logistik secara periodik
- Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat.

4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana, yaitu :
   - Penataan Ruang berbasis PRB
   - Pembentukan Desa Tangguh Bencana
   - Rumah Sakit terakreditasi (RS. I Lagaligo dan RS. Primaya Hospitasl Inco Soroako)
   - Puskesmas terakreditasi 17 dari 18 Puskesmas
   - Satuan Pendidikan Aman Bencana Kabupaten Luwu Timur
   - Forum Pengurangan Risiko Bencana Tingkat Desa
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, yaitu :
   - Rehabilitasi tanggul sungai
   - Normalisasi/Restorasi sungai
   - Pembangunan Bendung Sungai
   - Bangunan penahan gelombang (Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta)
   - Bangunan Perkuatan Tebing Sungai
   - Pembangunan Embung
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yaitu :
   - Dokumen Rencana Kontigensi Banjir
   - Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi
   - Sistem Peringatan Dini Banjir di Sungai Kalaena (Sirine Banjir dan Sensor TMA Sungai)
   - EWS INA Tews (Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi yang Berpotensi Tsunami)
   - Pelaksanaan Simulasi, Sosialisasi, Pelatihan, Gladi kesiapsiagaan
   - Pemasangan Rambu-Rambu dan Papan Himbauan Peringatan Bencana
   - RTD PT. Vale Indonesia mengenai kegagalan Bendungan
   - Penentuan Status Darurat Bencana
   - Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat
   - Pengerahan Tim Reaksi Cepat ke lokasi bencana
   - Pengerahan Tim SAR/BASARNAS
   - Pengerahan Bantuan Masyarakat dan Dunia Usaha
   - Penghentian Status Darurat Bencana

7. Pengembangan sistem pemulihan bencana, yaitu :
   - Perbaikan rumah penduduk (pasca bencana)
   - Bantuan Keuangan untuk korban bencana.

Mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah terkait kebencanaan yaitu Indeks Risiko Bencana, maka BPBD beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk menurunkan Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur melalui peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur melalui Penilaian Indeks Ketahanan Daerah. Hasil dari penilaian IKD akan berpengaruh terhadap penurunan Nilai IRB IRB Kabupaten Luwu Timur. Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 adalah 176,14 dari target 202, dengan persentase capaian 114,68%.

Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur tersebut mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. "***Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun".*** **IKD** dan **IRBI** menjadi **RAPOR** bagi **Pemerintah Daerah** di bidang penanggulangan bencana. ***Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota***

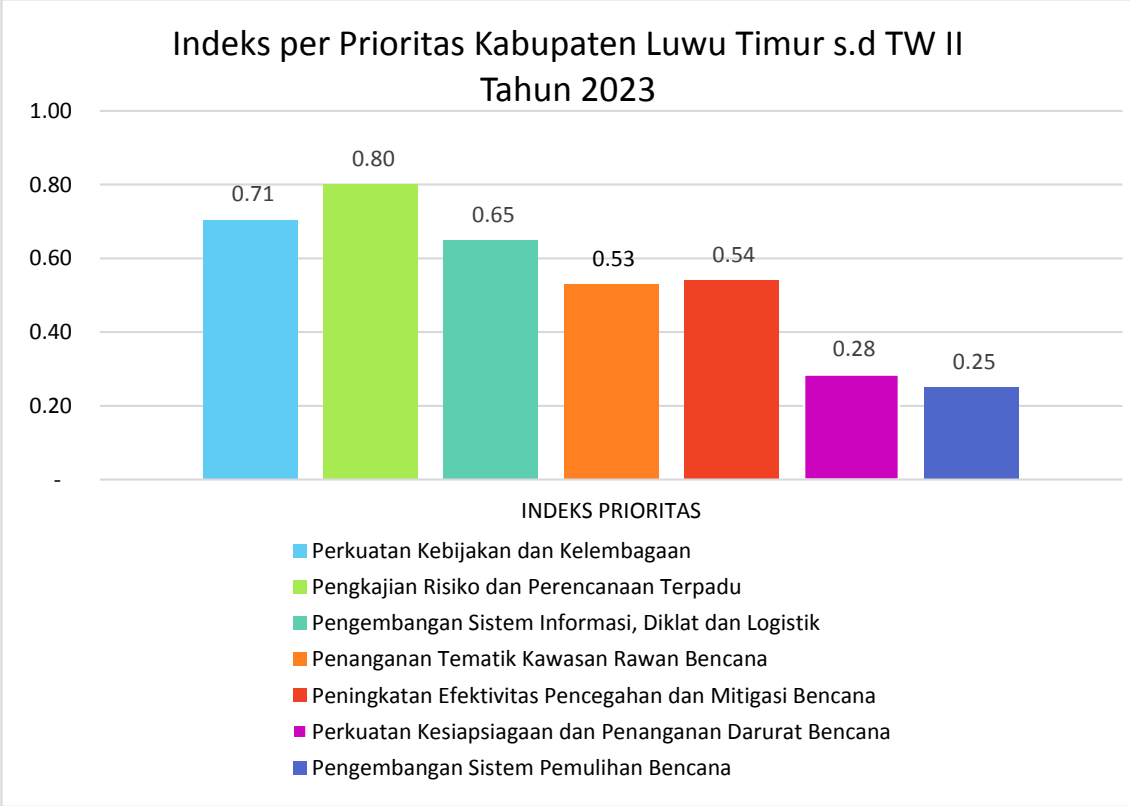

Grafik. 4
Prioritas penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2023

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.71	0.44	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0.80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.65		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.53		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.54		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.28		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.25		

Tabel. 7
Hasil Penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kab. Luwu Timur s.d Triwulan II Tahun 2023

❖ Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yaitu :

- Program Penanggulangan Bencana :
  1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
  3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
  4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Keterbatasan anggaran untuk pengurangan risiko bencana (pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan) yang melekat pada OPD strategis dan bukan hanya di BPBD
- Ketersediaan data dan informasi dari OPD terkait yang terbatas
- Belum meratanya pemahaman terkait IRB dan IKD di beberapa stakeholder
- Telah banyak upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan namun belum terpetakan dengan baik
- Penilaian IKD dilaksanakan diakhir tahun oleh BNPB

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- Mengusulkan penggunaan dana desa untuk kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
- melakukan penjemputan data dan informasi ke OPD terkait
- Melakukan sosialisasi/lokakarya terkait IRB dan IKD
- Melakukan pemetaan terkait upaya pengurangan risiko bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Luwu Timur
- Pelaksanaan FGD untuk penilaian IKD sesuai timeline

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis BPBD, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

- Terkait kebutuhan logistik penanggulangan bencana, pada tahun 2023, BNPB memfasilitasi logistik untuk korban bencana melalui BPBD Provinsi Sul-Sel, daftar bantuan logistik Tahap I yaitu : Mie Instant 20 Dos, Logistik Pangan (Beras, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir, Madu Sachet, dan Multi Vitamin) 15 Paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta Gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut dan Sarung) 7 Paket, Perlengkapan Bayi (Minyak Telon, Popok, Bedak Bayi, Botol Susu, Baju dan Celana Bayi, selimut Bayi) 4 Paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut dan Alas Tidur) 10 Paket. Sedangkan Tahap II yaitu :Logistik Pangan (Air Mineral dan Beras) 20 Paket, Mie Instant 20 Dos, Selimut BNPB 10 Lembar, Makanan Siap Saji 18 Paket dan Sabun Mandi BNPB 2 Dos.
- Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar lainnya untuk korban bencana seperti beras dan bahan makanan pokok lainnya selain dari BPBD sendiri, juga difasilitasi oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Dalam pencapaian target program prioritas Pemerintah Daerah yaitu MITIGASI BENCANA, realisasi dapat diperoleh dari pelaksanaan program/kegiatan di Desa melalui Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2023 yang dilaksanakan oleh 125 desa di Wilayah Kabupaten Luwu Timur dengan total jumlah anggaran Rp 1.250.000.000,- Kegiatan yang dilaksanakan pembuatan Peta Jalur Evakuasi di setiap desa. Capaian kinerja tersebut juga berdampak kepada Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

- Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang kebencanaan, maka dapat terfasilitasi dengan adanya papan himbauan atau peringatan dini yang ditempatkan pada beberapa kecamatan sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media atau papan himbauan peringatan dini tersebut.

Dan penyebarluasan informasi kebencanaan juga dilakukan melalui Media Sosial melalui FB, IG & Twitter yaitu *Pusdalops Bpbd Lutim*.

- Sumber daya yang ada pada BPBD Kabupaten Luwu Timur baik sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan masih belum memadai, namun dengan keterbatasan tersebut, BPBD tetap berupaya untuk bekerja maksimal dalam penanggulangan bencana. Sumber daya manusia yang ada di BPBD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 40 orang yang terdiri dari 13 orang PNS, 3 orang Upah Jasa, dan 24 orang Tim Reaksi Cepat (TRC). Dengan membandingkan luas cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada. Maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Luwu Timur memaksimalkan tenaga relawan-relawan dari berbagai komunitas seperti Tim Relawan Penanggulangan Bencana yang berjumlah 182 orang yang tersebar di 11 kecamatan, BASARNAS, Tim SAR, TAGANA, PMI dsb. Sedangkan dari segi sumberdaya sarana dan prasarana dalam hal ini terkait peralatan bencana, BPBD memaksimalkan peralatan yang dimiliki oleh OPD terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perhubungan, BASARNAS dsb.
- Terkait pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana, juga dapat difasilitasi oleh SKPD terkait seperti Dinas PU & PR, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman & Pertanahan. Jadi dalam hal ini bahwa pemulihan sarana dan prasarana fisik serta nonfisik pasca bencana dapat terwujud melalui kerjasama/koordinasi lintas sektoral baik itu dari BPBD maupun OPD terkait dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada. Terkait Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana, telah diajukan Proposal ke BNPB dan telah di Verifikasi Oleh BNPB dengan Besaran Anggaran Rp 8.587.571.000,-.

❖ Analisis Efisiensi Sumber Daya

Tabel. 8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)	Alokasi s.d TW II	Realisasi s.d TW II	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,45	0,44	97,77%	812.623.242,-	271.242.000,-	33,37%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	66,53%	66,53%	200.201.742,-	4.060.000,-	2,03%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	124.720.000,-	0,-	0%
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100%	100%	405.288.200,-	250.313.500,-	61,76%

Tabel. 9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	97,77%	33,37%	66,63%

Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana sebesar 97,77% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 33,37%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 66,63%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efiesinesi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian indikator sasaran tersebut yaitu :

- Adanya Data Base (Baseline 2022) berdasarkan hasil penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Telah dilakukan pemutakhiran data IKD setiap tahun oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur
- Terdapat beberapa rekomendasi pada penilaian IKD yang telah ditindaklanjuti seperti penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, PUSDALOPS BPBD, Sistem Peringatan Dini Banjir (EWS), RDTR yang telah berbasis Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan beberapa rencana penyusunan dokumen kebencanaan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra BPBD 2021-2026.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah karena telah menetapkan Mitigasi Bencana sebagai program prioritas kepala daerah dan dukungan penganggaran untuk kegiatan Mitigasi Bencana di seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur melalui Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK)

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya

Tabel. 10
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana						Target Tahun 2023
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan II Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.45	0,44	97,77 %	0.45	0,44	97,77 %	0.45 (sedang)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa capaian Triwulan II tahun 2023 dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2023 masih dalam sama. Hal ini karena penilaian IKD tahun s.d Triwulan II Tahun 2023 masih berdasarkan Nilai tahun sebelumnya. Data tersebut diatas masih berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023, FGD untuk Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) direncanakan pada Triwulan IV TA. 2023 sesuai dengan Timeline Penilaian IKD dan diverifikasi oleh BNPB pada bulan Desember 2023..

Penetapan target yang meningkat setiap tahunnya disesuaikan dengan target dalam Renstra BPBD 2021-2026. Dari 71 indikator yang menjadi penilaian dalam Indeks Ketahanan Daerah (IKD), terdapat beberapa dokumen yang telah dipenuhi misalnya Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Gempa Bumi, Kajian Risiko Bencana telah terintegrasi dalam penyusunan RDTR beberapa kecamatan, telah dilakukan Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana dsb.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Berdasarkan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan dapat dicapai. Dan upaya yang dilakukan adalah melakukan pemutakhiran Nilai IKD melalui FGD Penilaian Indeks Ketahanan Daerah setiap tahunnya, agar 7 prioritas dengan 71 indikator dapat dipenuhi secara bertahap, yang pada akhirnya dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Luwu Timur.

Adapun perbandingan antara target dan capaian pada Triwulan II tahun 2023 dengan target jangka menengah pada Renstra BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran I :	Meningkatnya Ketahanan Daerah menghadapi Bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan II Tahun 2023	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,44	0,44	0,50 (sedang)	88%

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana

- ***Indikator 1***
  "Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana"

Grafik. 5
Capaian Kinerja Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana Triwulan II Tahun 2023

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023

Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : **"**Pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)**"**

Indeks .Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Perhitungan indeks capaian SPM dilakukan melalui penginputan pada aplikasi SPM dengan ***link https//spm.bangda.kemendagri.go.id.***

Target Indikator sasaran 2 Tahun 2023 adalah 100% dan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah 84,12% dengan persentase capaian kinerja 84,12%. Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan karena salah satu layanan SPM yaitu Layanan Informasi Rawan Bencana yang tidak tercapai 100%.

Layanan informasi rawan bencana dapat diberikan kepada Masyarakat melalui 3 metode yaitu sosialisasi melalui tatap muka dengan masyarakat di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia serta sosialisasi melalui papan informasi publik. Dari ketiga hal tersebut, salah satu metode penyebaran informasi melalui papan informasi publik yang ditempatkan di 3 kecamatan mengalami kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan sehingga capaian penyebaran informasi menjadi tidak maksimal atau tidak sesuai dengan target yang direncanakan.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penanggulangan Bencana :
  1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
     - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
     - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
  2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
     - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
     - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
     - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
     - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Kontijensi
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi terhadap Korban bencana
   - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
   - Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
   - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
   - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
   - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
4. Kegiatan Penataan Dasar Sistem Penanggulangan Bencana
   - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
   - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
   - Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- Kurangnya sosialisasi
- Minimnya kualitas SDM penanggulangan bencana
- Belum maksimalnya pemahaman terkait konsep pelayanan dasar
- Keterbatasan anggaran
- Terdapat beberapa media penyampaian informasi peringatan dini bencana yang mengalami kerusakan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan melalui papan informasi publik
- Memaksimalkan koordinasi lintas OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian SPM di kabupaten misalnya dengan Dinas PMD terkait penggunaan Dana BKK untuk Mitigasi Bencana di desa, Dinas Sosial &P3A terkait penyediaan logistik untuk

korban bencana, Dinas PUPR terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Mitigasi Bencana Struktural dsb.

- Pencapaian target semaksimal mungkin dengan mencermati capaian program/kegiatan lintas OPD yang berkontribusi dalam pencapaian SPM urusan bencana.
- Peningkatan kapasitas SDM penanggulangan bencana melalui diklat/pelatihan dan simulasi

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

- Penggunaan dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Desa untuk pelaksanaan Mitigasi Bencana di desa.
- Efisiensi anggaran logistik untuk korban bencana karena adanya supporting logistik dari BNPB dan BPBD Provinsi Sul-Sel dan OPD terkait seperti bantuan logistik dari Dinas Sosial & P3A, Cadangan Pangan dari Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

Dalam pencapaian sasaran 2, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

- Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi kebencanaan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana BMKG dalam penyebarluasan informasi kebencanaan seperti alat deteksi gempa bumi lokal yang berada di 3 titik yaitu di Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Ussu Kec. Malili, Desa Kalpataru Kec. Tomoni dan Alat Ina TEW untuk mendeteksi gempa yang berasal dari luar Kabupaten Luwu Timur yang ditempatkan di Kantor BPBD.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan II Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Tabel. 12
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran II :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana						Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan I Tahun 2023			Triwulan II Tahun 2023			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	100%	83,96%	83,96%	100%	84,12%	84,12%	100%

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Triwulan II Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa layanan mutu dari ketiga layanan SPM tersebut telah realisasi misalnya telah diikuti beberapa bimtek/diklat kebencanaan, penyebaran informasi kebencanaan melalui media sosial dan layanan penyelamatan dan evakuasi yang realisasinya maksimal 100% begitu juga dengan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 100%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 – 2026)

Sasaran 2 :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan IITahun 2023	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Indeks Capaian SPM Sub Urusan bencana (%)	84,12	84,12	100	84,12%

Berdasarkan realisasi Triwulan II Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target yang direncanakan sampai dengan tahun 2026, sangat memungkinkan untuk dapat

dicapai. Dan upaya yang dilakukan untuk mencapai target 3 layanan dasar sub urusan bencana yaitu untuk layanan informasi rawan bencana dengan cara memaksimalkan penyebaran informasi melalui media sosial dan papan himbauan terkait kebencanaan di setiap kecamatan serta sosialisasi secara tatap muka melalui pelaksanaan Sosialisasi KIE rawan bencana di 11 kecamatan. Sedangkan untuk layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dengan cara memasimalkan pelaksanaan kegiatan serta anggaran yang terdapat pada beberapa OPD terkait, dunia usaha dan Masyarakat. Begitu juga untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (SPM Penanggulangan Bencana)

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, maka terdapat 3 jenis pelayanan dasar pada sub urusan bencana yang wajib dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adapun ***Target nasional*** dari ketiga jenis pelayanan dasar tersebut adalah ***100% setiap tahun***. Olehnya itu perbandingan antara target nasional dengan capaian Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 14

Realisasi Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Uraian Kinerja			Anggaran		(%)
		Indikator Capaian	Target TW II TA.2023 (%)	Realisasi TW II TA. 2023 (%)	Anggaran TW II TA. 2023 (Rp)	Realisasi TW II TA. 2023 (Rp)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pelayanan Informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	66,53%	200.201.000,-	4.060.000,-	2,03%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	124.720.000,-	0,-	0%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	405.288.200,-	250.313.500,-	61,76%

Tabel. 15

Alokasi Anggaran Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program/ Kegiatan / sub Kegiatan	Alokasi Biaya		
			Anggaran		
			APBN	APBD	Sumber dana lain yang sah
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
		Program Penanggulangan Bencana	-	**1.440.694.332,-**	-
1	**Pelayanan Informasi Rawan bencana**	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	-	**200.201.742,-**	-
		Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	-	174.995.642,-	-
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	25.206.100,-	-

2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	-	**485.492.590,-**	-
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	-	174.790.750,-	-
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	-	32.425.900,-	-
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	-	94.830.000,-	-
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	-	34.912.800,-	-
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	-	29.890.000,-	-
		Penyusunan Rencana Kontijensi	-	99.506.640,-	-
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	19.136.500,-	-
3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	-	**755.000.000,-**	-
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	-	625.000.000,-	-
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	40.000.000,-	-
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	-	40.000.000,-	-
		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	-	30,000,000,-	-
		Aktivasi system komando penanganan darurat bencana	-	20.000.000,-	-

Tabel. 16
Kendala, Permasalahan dan Solusi
SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	KENDALA/PERMASALAHAN	SOLUSI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	***(1).*** Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana, ***(2).*** Terdapat Papan Himbauan Informasi Bencana di 3 Kecamatan dalam kondisi rusak berat.***(3).*** **Sub Kegiatan** Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana baru akan dilaksanakan pada triwulan II TA. 2023, namun belum realisasi	***(1)***.Memaksimalkan penyebarluasan informasi rawan bencana melalui Pusdalops Penanggulangan Bencana, Papan Himbauan Peringatan Dini dan Media Sosial, ***(2)***.Memaksimalkan keterlibatan Dunia Usaha dan Masyarakat dalam penyebarluasan informasi rawan bencana, ***(3***).Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan.
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	***(1).*** Keterbatasan Anggaran/pembiayaan penanggulangan bencana	***(1)***.Meningkatkan koordinasi dilingkup Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan masyarakat terkait kegiatan kebencanaan, ***(2)***.Memaksimalkan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	***(1)***.Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, ***(2)***.Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, ***(3)***.Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia yang memahami mekanisme penanggulangan bencana baik secara teknis maupun non teknis	***(1)***.Pengadaaan sarana dan prasarana penanggulangan melalui BNPB dan BMKG, **(2)**.Penguatan Tim Relawan Penanggulangan Bencana di Kecamatan, ***(3)***.Pembentukan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana, **(4)**. Keikutsertaan dalam kegiatan Diklat Kebencanaan baik yang dilaksanakan oleh BNPB, BASARNAS, BPBD Provinsi dan BPBD Kab. Luwu Timur

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran

❖ Progam Program Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan program penanggulangan bencana yaitu : memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menyelaraskan peraturan perundang-

undangan yang sudah ada, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan, menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sasaran program adalah : (1) Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana, ***(2)*** Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana, ***(3)*** Terselenggaranya penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana

- Capaian Kinerja Program Penanggulangan Bencana (outcome)

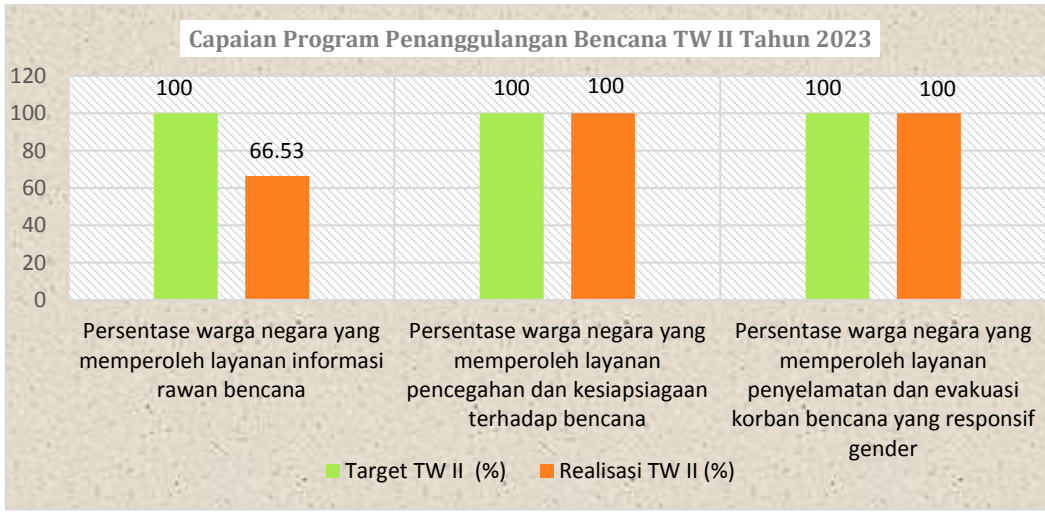

Grafik. 6
Capaian Kinerja Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2023

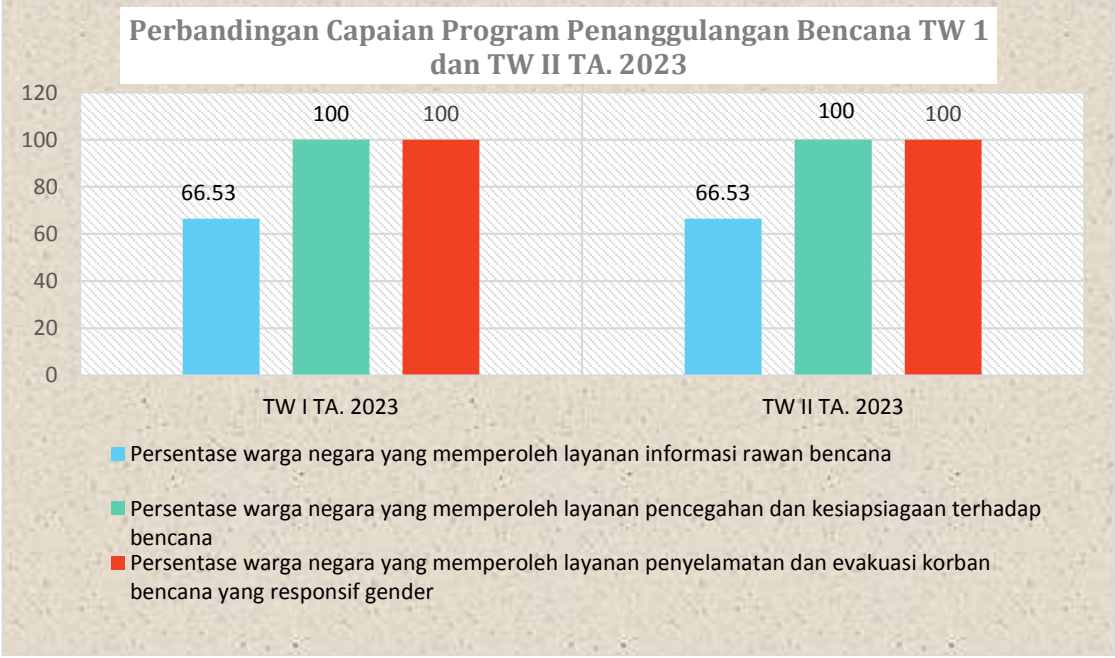

Grafik. 7
Perbandingan Capaian Program Penanggulangan Bencana Triwulan I dengan Triwulan II TA. 2023

Indikator Program Penanggulangan Bencana Tahun 2023 adalah :

1. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)

   Formulasi : *"Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus".*

   Target Triwulan II tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 66,53% dengan persentase capaian kinerja 66,53%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Layanan Informasi kebencanaan melalui PUSDALOPS BPBD, Penyampaian informasi kebencanaan melalui Papan himbauan informasi bencana yang ditempatkan di 8 kecamatan dan Pemasangan Rambu evakuasi di 8 desa di Kec. Malili dengan akumulasi jumlah masyarakat yang menerima informasi sebesar 200.955 org dibagi jumlah penduduk Kab. Luwu Timur 302.039 jiwa (masih menggunakan baseline awal). Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena terdapat 3 kecamatan yang belum tersedia papan himbauan informasi bencana karena kondisinya rusak berat. Sedangkan penyebarluasan informasi kebencanaan melalui tatap muka langsung dalam bentuk pelaksanaan Sosialisasi rawan bencana direncanakan pada triwulan II TA. 2023 namun belum realisasi.

2. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencan**a (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)
Formulasi : *"Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus".*
Target Triwulan II tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian tersebut berasal dari pelaksanaan Penempatan alat deteksi gempa lokal sesar matano di 3 lokasi yaitu Desa Matompi Kec. Towuti, Desa Atue Kec. Malili dan Desa Kalpataru Kec. Tomoni, Penempatan alat deteksi banjir di Kec. Kalaena dan Alat deteksi gempa bumi sesar-sesar dari luar Kab. Luwu Timur di Kantor BPBD Kab. Luwu Timur. Dan semua peralatan tersebut dapat memantau seluruh wilayah kabupaten Luwu Timur, dan dapat diasumsikan bahwa seluruh warga negara yang ada di Kab. Luwu Timur yang berjumlah 302.039 jiwa (baseline data) memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan untuk pelaksanaan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penguatan Kapasitas Kawasan (pembentukan Desa Tangguh Bencana) dan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana direncanakan pada triwulan II, III dan IV TA. 2023.

3. **Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender** (Indikator SPM Sub Urusan Bencana)
Formulasi : *"Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana dibagi jumlah seluruh keseluruhan korban bencana dikali seratus".*
Target Triwulan II tahun 2023 adalah 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan januari s.d Juni 2023 sebanyak 1190 jiwa (590 laki-laki dan 600 perempuan) dan semuanya memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi. Jumlah tersebut merupakan akumulasi total korban bencana dari 207 kejadian bencana yang terjadi di Kab. Luwu Timur.

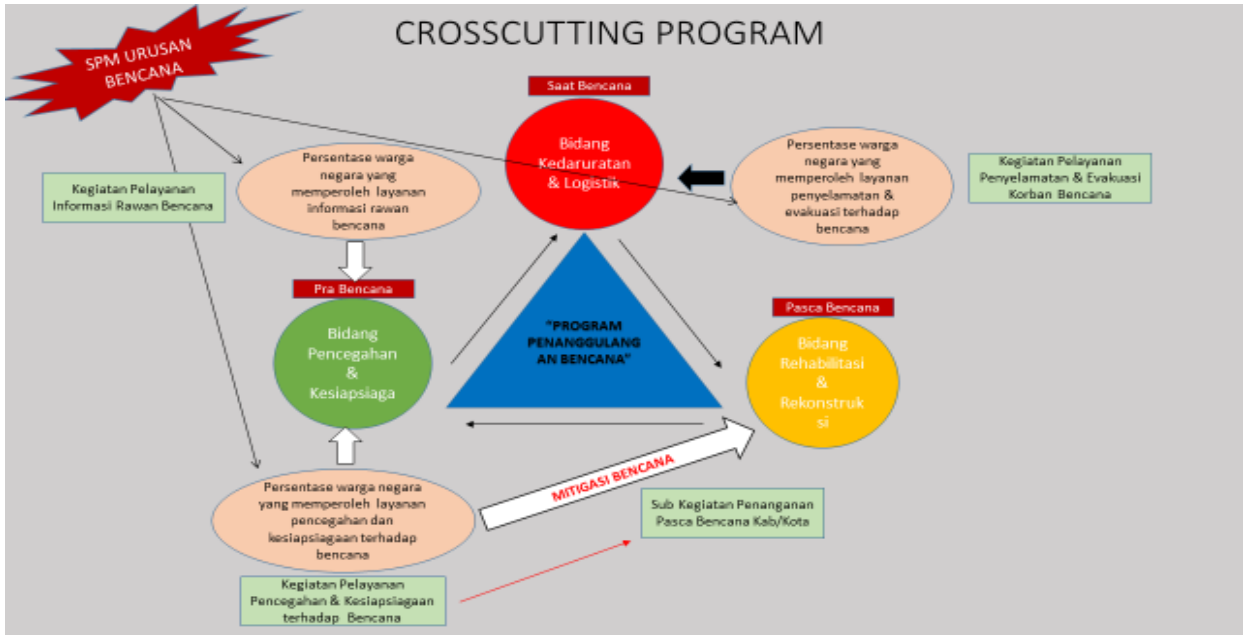

Pada tahun 2023, Program Penanggulangan Bencana didukung oleh 3 kegiatan Utama yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bencana yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Tabel. 17
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana kepada warganegara yang berada dikawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,08%	0,08 %	100%
a.	Penyusunan Kajian resiko bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
b.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/kota (Per Jenis Bencana)	Terselenggaranya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan	250 org	250 org	100%

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi rawan bencana agar warga negara lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada diwilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazard/bahaya) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Indikator kegiatan adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan ***Formulasi*** *: Jumlah warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana dibagi jumlah seluruh warga negara yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus.* Target Tahun 2023 adalah 0,08% (250 org) dan realisasi 0,08% dengan persentase capaian kinerja masih 100%.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

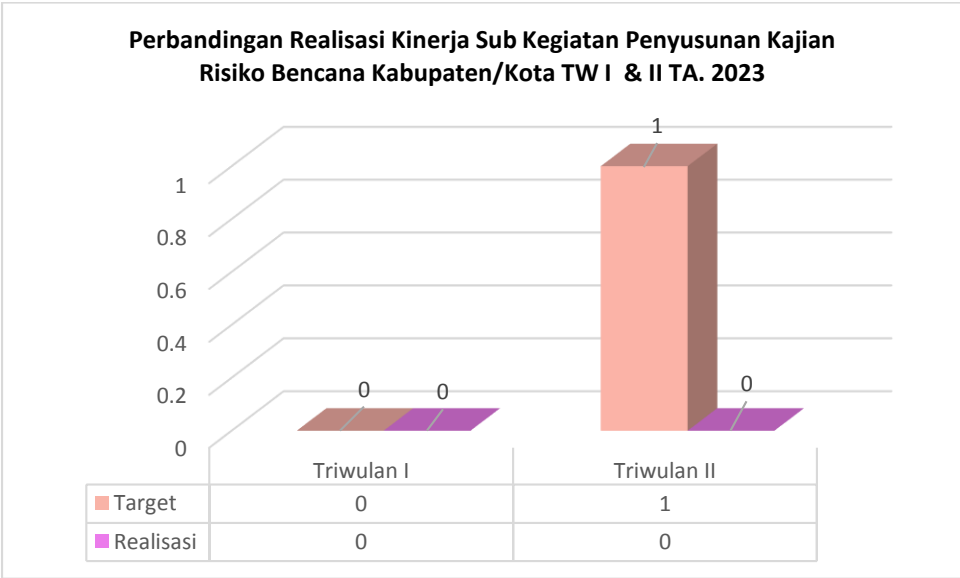

Grafik. 8
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal dengan target 1 dokumen dan realisasi 0 dokumen, persentase capaian masih 0%. Target penyelesaian dokumen Kajian Risiko Bencana pada Triwulan II, namun proses pelaksanaan sub kegiatan dimulai di triwulan I dan sampai saat ini baru akan dilaksanakan konsultasi dengan pihak terkait (tenaga ahli).

b. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

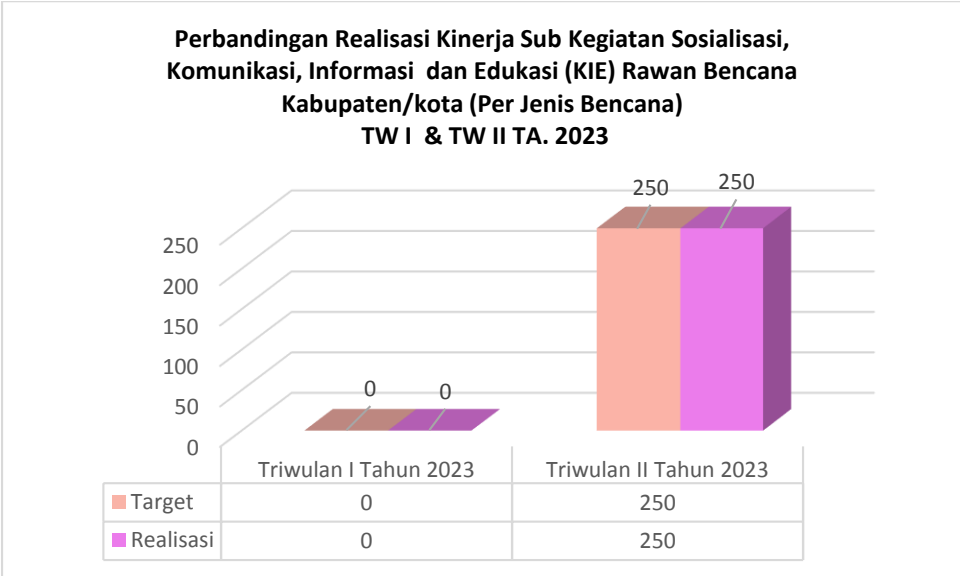

Grafik. 9
Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 250 orang dan realisasi 250 orang, persentase capaian masih 100%. Sub kegiatan dilaksanakan di Gedung Wanita Simpurusiang Kec. Malili dan peserta berasal dari Tim Pengerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang berasal dari 11 kecamatan. Disediakan anggaran kas sebesar Rp 25.206.100,- namun realisasi keuangan masih 0%, hal ini karena pertanggungjawaban keuangan di realisasikan pada bulan Juli 2023.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Tabel. 18
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana di daerah rawan bencana	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,9%	0%	0%
a.	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kota	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
b	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlatihnya aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0 org	0 org	0%
c.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan	21 unit	0 unit	0%
d.	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang di bentuk	2 Desa	0 Desa	0%
e.	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota	Terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penanganan bencana	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat	50 org	0 org	0%
f.	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya data/informai tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal	0 Dok	0 Dok	0%
g.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya warga negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	0 org	0 org	0%

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Dengan dasar pemikiran bahwa pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana.

Indikator kegiatan adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. *Adapun formulasinya adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang berada di daerah rawan yang mengikuti pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah seluruh warga negara dan aparatur yang berada di daerah rawan bencana dikali seratus*. Target pada triwulan II TA. 2023 adalah 1,9% dan realisasi 0% dengan persentase capaian kinerja 0%. Hal ini karena sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada Triwulan II TA. 2023 belum realisasi karena adanya perubahan target untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana dari 2 Desa menjadi 4 Desa. Sedangkan untuk Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas TRC masih dalam proses kelengkapan administrasi.

Pencapaian target kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

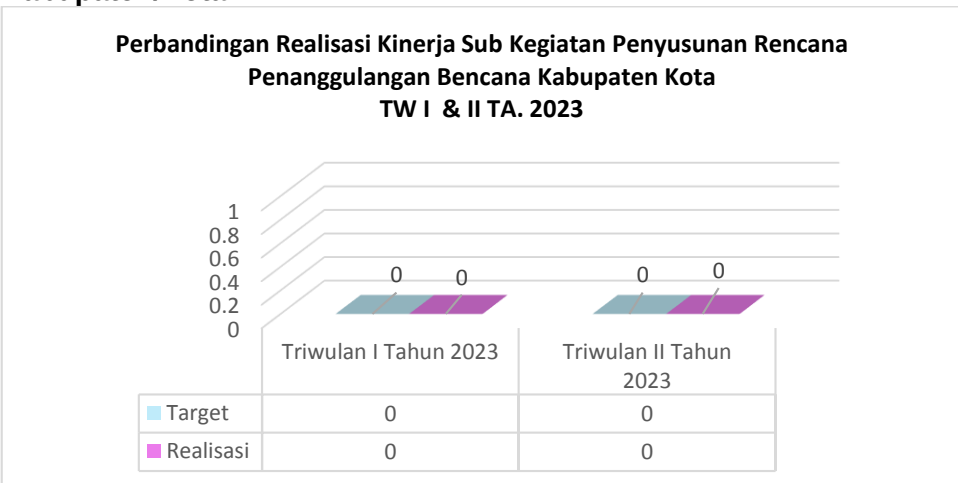

Grafik 10
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal dengan target 1 dokumen dan realisasi 0 dokumen, persentase capaian masih 0%. Target penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pada Triwulan IV TA. 2023.

b. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

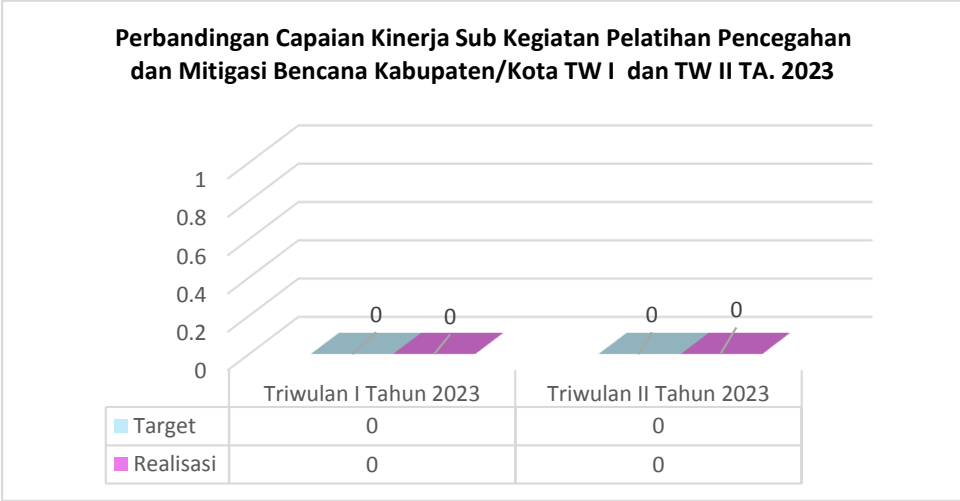

Grafik. 11
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan dengan target 50 orang. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III TA. 2023.

c. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

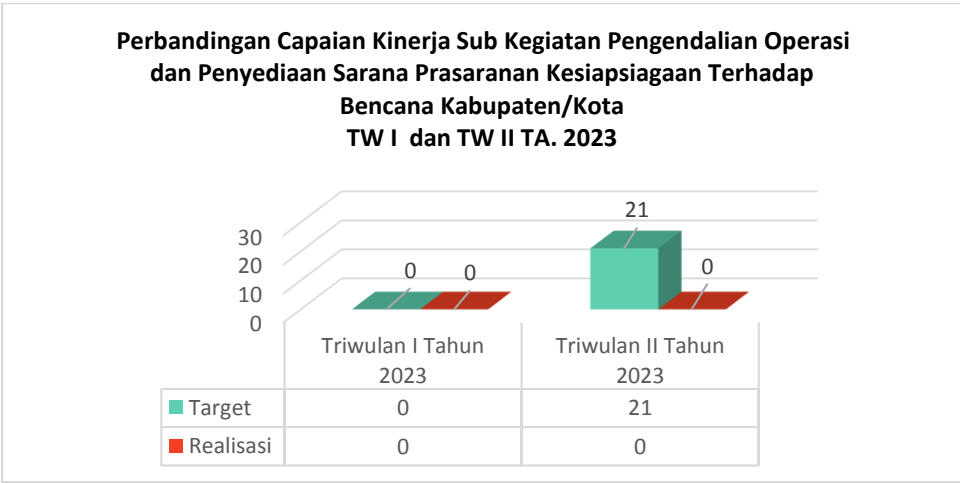

Grafik. 12
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 21 unit. Berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan direncanakan pada Triwulan II TA. 2023 namun belum realisasi, saat ini masih dalam proses pencarian harga perahu karet sesuai dengan spek yang direncanakan, namun terkendala tidak terdapat di e-catalog, untuk selanjutkan dikonsultasikan dengan pejabat pengadaan untuk pengadaan melalui Mbizmarket atau metode pengadaan lain.

d. Sub Kegiatan Pengutan Kapasitas Kawasan untuk Pecegahan dan Kesiapsiagaan

Grafik 13
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk dengan target 2 desa. Pencapaian target direncanakan pada Triwulan II TA. 2023, namun belum direalisasikan menungu perubahan anggaran karena direncanakan untuk menyesuaikan dengan target dalam dokumen Renstra BPBD yaitu Pembentukan 4 Destana untuk tahun 2023.

e. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Grafik. 14
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat dengan target 50 orang dan berdasarkan anggaran kas, pencapaian target direncanakan pada Triwulan II TA. 2023, namun belum realisasi dan saat ini masih dalam proses persiapan pelaksanaan kegiatan.

f. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi

Grafik 15
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen renkon yg di susun sampai di nyatakan sah/legal dengan target 1 dokumen. Berdasarkan angaran kas, pencapaian target direncanakan pada Triwulan IV TA. 2023.

g. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

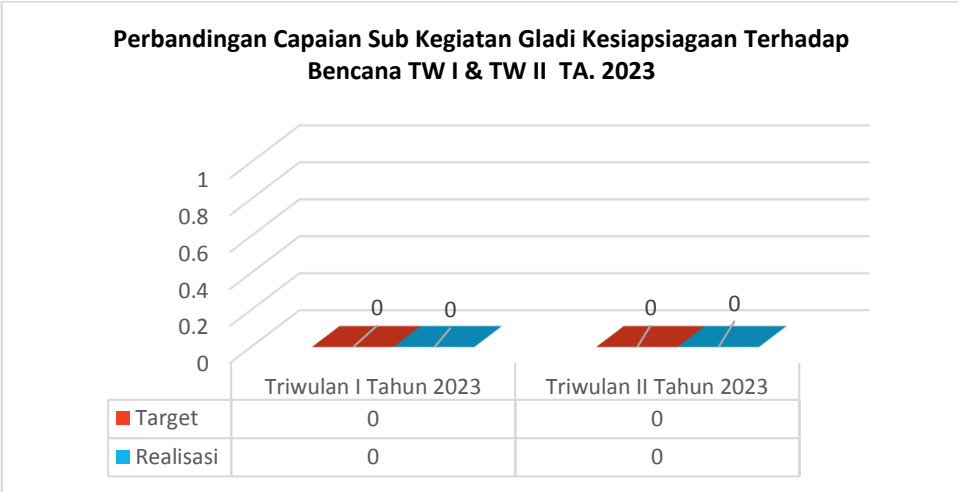

Grafik 16
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 orang. Pencapaian target direncanakan pada Triwulan IV TA. 2023.

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Tabel. 19
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target TW II 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian (%)
1.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai standar	Cukupan sistem dasar penanggulangan bencana sesuai SOP kebencanaan	0%	0 %	0%
a.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya regulasi penanggulanga bencana	Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun	3 Dok	0 Dok	0%
b.	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya wadah yang melibatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dan seluruh pemangku	Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi	1 Lembaga/Forum	0 Lembaga/ Forum	0%

		kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana				
c.	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor terdampak pasca bencana	Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	2 Dok	2 Dok	100%

a. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

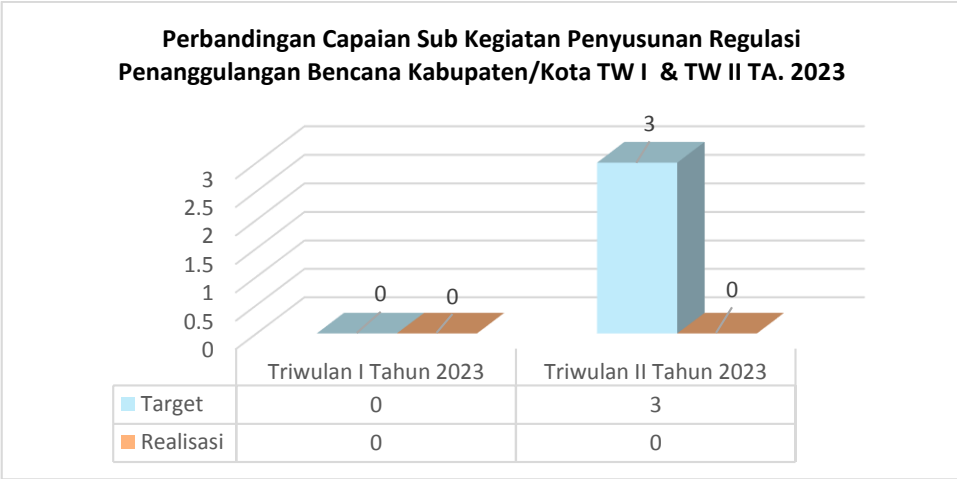

Grafik. 17
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun dengan target 3 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan direncanakan pada Triwulan II TA. 2023, namun belum realisasi dan masih dalam proses penyusunan SOP.

b. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

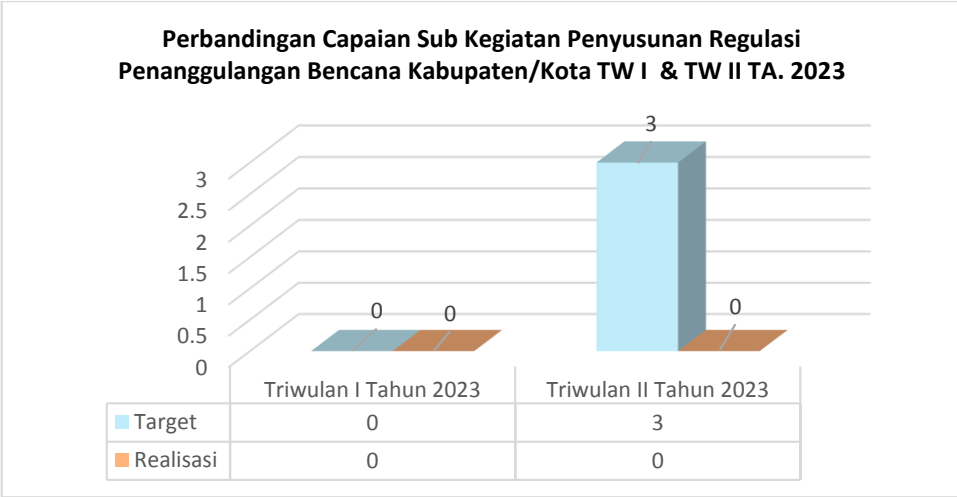

Grafik.18
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi dengan target 1 lembaga/forum. Berdasarkan anggaran kas, pelaksanaan sub kegiatan direncanakan pada Triwulan I TA. 2023. Dan saat ini dalam proses identifikasi OPD, Dunia Usaha, Akademisi dan Tokoh Masyarakat yang akan diikutsertakan dalam Forum PRB. Disediakan anggaran kas sebesar Rp 34.005.500,- untuk pelaksanaan pembentukan Forum PRB dan realisasi keuangan masih 0 %.

c. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana

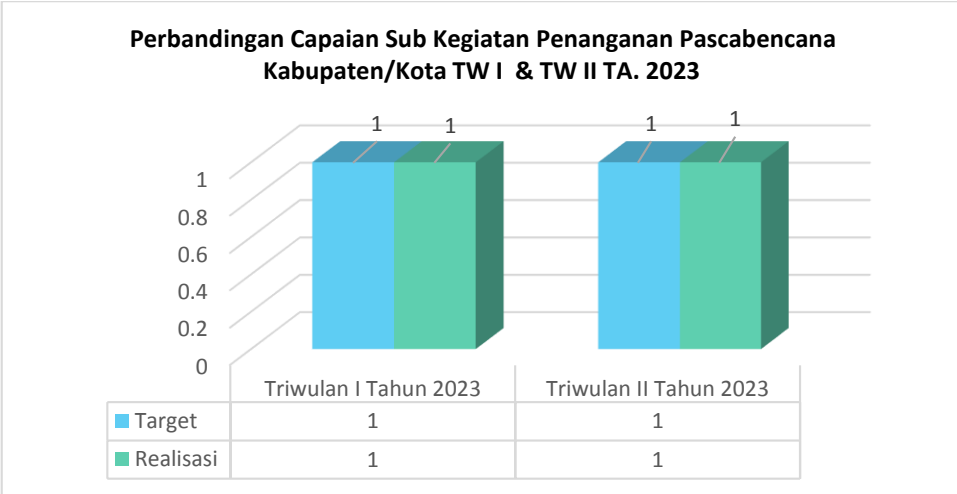

Grafik. 19
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah dokumen pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang disusun dengan target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen setiap triwulan, persentase capaian kinerja 100%. Dokumen tersebut berisi rekomendasi usulan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana berdasarkan hasil identifikasi, dan akan diteruskan ke OPD terkait yang menangani ataupun dapat diusulkan ke BNPB (Dana Hibah RR) melalui proposal. Selain penanganan pasca bencana, hasil identifikasi juga diarahkan untuk penanganan mitigasi bencana untuk wilayah yang berpotensi bencana, sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin. Disediakan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 28.435.000,- yang terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 550.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 500.000,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 150.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.225.000,- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp26.010.000, Realisasi masih 51,11%, masih ada SPJ yg belum dipertanggungjawabkan seperti belanja makan dan minum, belanja cetak dan penggandaan, sedangkan untuk perjalanan dinas telah dilakukan koordinasi ke BNPB terkait pengajuan proposal dana Hibah RR dan ke BBWS Jeneberang terkait rekomendasi teknis terhadap usulan rekonstruksi tanggul sungai Desa Lauwo Kec. Burau.

4. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel. 20
Capaian Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Triwulan II TA.2023	Realisasi Triwulan II TA. 2023	Capaian (%)
1.	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%	100 %	100%
a.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%

b.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%
c.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender	100%	100%	100%
d.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit	100%	100%	100%
e.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman. Dengan dasar pemikiran bahwa keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Kegiatan ini bertujuan untuk : *(1)* menemukan lokasi bencana, korban manusia, dan harta benda yang hilang atau dikhawatirkan akan hilang akibat bencana, *(2)* Menolong korban bencana yang sakit akibat bencana, *(3)* Menindahkan korban dari lokasi bencana ke tempat yang aman.

Indikator kegiatan adalah Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender dengan **Formulasi Indikator** : Jumlah korban bencana yang dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi jumlah perkiraan korban bencana dikali seratus dengan target 100% dan realisasi 100% dengan persentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja 100% karena berdasarkan jumlah kejadian bencana pada bulan Januari

s.d Juni tahun 2023, terdapat 1.190 jiwa korban terdampak (590 Laki-laki dan 600 Perempuan), dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi dan semua kejadian bencana yang terjadi, direspon kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian bencana. Dari 207 kejadian terdapat 5 kejadian orang hilang/tenggelam yang mendapat penanganan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 182 kejadian (gempa bumi) dilakukan pengecekan data pada Sistem WRS (Warning Receiver System) dan dilaporkan ke pusat dan propinsi melalui PUSDALOPS BPBD. Cuaca ekstrim (angin kencang) 4 kejadian, dan Kebakaran rumah 5 kejadian, difasilitasi dengan penyaluran bantuan logistik dan memperoleh Dana BTT untuk korban bencana. Kegiatan ini sifatnya disediakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kejadian bencana yang terjadi.

Pencapaian target Kegiatan ini didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

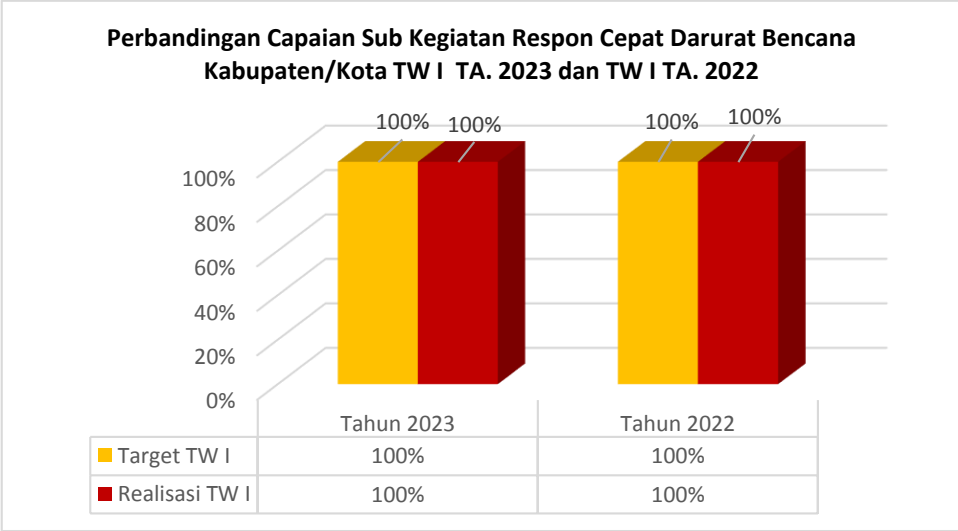

Grafik. 20
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan Januari s.d Juni 2023 yaitu 207 kejadian yaitu orang hilang 5 kejadian, kebakaran rumah 5 kejadian, banjir 8 kejadian, angin kencang/cuaca ekstrim 4 kejadian dan gempa bumi 182 kejadian dan semuanya direspon kurang dari 24 jam

ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat oleh Tim Reaksi Cepat BPBD. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 325.065.000,- Terealisasi sebesar Rp. 232.318.250,- atau sebesar 71.47% dari target anggaran Triwulan II. Namun masih Terdapat SPJ Honor/Upah Kerja TRC periode bulan Juni 2023 sebesar Rp. 34.500.000-, SPJ makan minum Jaga TRC selama bulan Juni 2023 sebanyak Rp.12.960.00 ,- yang belum di GU-kan. dan SPJ Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp 10.318.000,-dan SPJ Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan Komputer sebesar Rp 450.000,-. Jadi Total SPJ yang belum ter GU kan sebesar Rp. 58.228.000,- atau sebesar 17.91 % dari anggaran Kas.

Dokumentasi

b. Sub Kegiatan Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

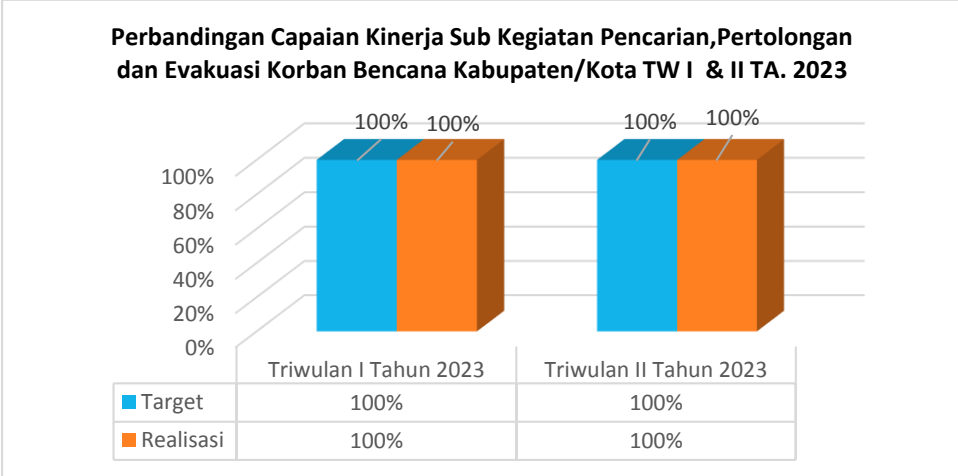

Grafik. 21
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana melalui pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat dan evakuasi korban bencana. Penyelamatan dan evakuasi berfokus pada tindakan penyelamatan berupa pencarian atau perpindahan dari tempat kejadian bencana ke tempat yang lebih aman

Indikator sub kegiatan adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan Januari s.d Juni 2023 sebanyak 1.190 (Laki-laki = 590 jiwa dan Perempuan = 600 jiwa) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 27.456.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.834.750,- atau bsebesar 24.53%, Namun masih terdapat SPJ perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Bahan Bakar Minyak/pelumas yang belum di GU-kan sebesar Rp. .5.250.000,- .sehingga belum terealisasi sebesar 36,58 % dari target anggaran kas.

Dokumentasi

c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

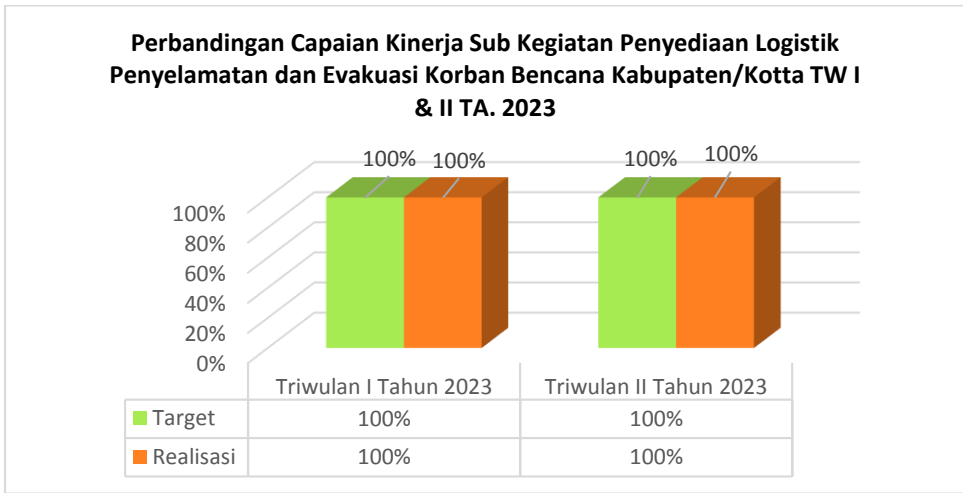

Grafik. 22
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Sub kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana seperti hunian sementara (tenda), sandang,

pangan, kebutuhan air bersih, kebutuhan sanitasi serta kebutuhan dasar lainnya

Indikator sub kegiatan adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Maret 2023 sebanyak 1.190 jiwa. Bantuan logistik yang diberikan berupa sandang pangan maupun hunian sementara (tenda). Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 25.456.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.160.000.,- atau sebesar 43.84% dari target anggaran kas pada triwulan II. Namun masih terdapat SPJ perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi yang belum di GU-kan sebesar Rp. 9.312.000,- . Pada dasarnya anggaran kegiatan sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kejadian bencana. Pada dasarnya anggaran kegiatan sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kejadian bencana. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena pada tahun 2023, tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan, disamping itu terdapat bantuan logistik penanggulangan bencana dari BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang diantar langsung oleh Tim, sehingga terdapat efisiensi Belanja Bahan Pangan dan Belanja Paket/Pengiriman Logistik serta Belanja Sewa Mobilitas Darat. Jenis bantuan logistik yang diperoleh dari propinsi yaitu : bantuan logistik Tahap I (14 Februari 2023) yaitu : Mie Instant 20 Dos, Logistik Pangan (Beras, Air Mineral, Minyak Goreng, Ikan Kaleng, Gula Pasir, Madu Sachet, dan Multi Vitamin) 15 Paket, Perlengkapan Keluarga (Sabun Mandi, Sikat Gigi, Pasta Gigi, Shampo, Handuk Kecil, Handuk Dewasa, Pembalut dan Sarung) 7 Paket, Perlengkapan Bayi (Minyak Telon, Popok, Bedak Bayi, Botol Susu, Baju dan Celana Bayi, selimut Bayi) 4 Paket, Shelter Kit (Terpal, Selimut dan Alas Tidur) 10 Paket. Sedangkan Tahap II (27 Maret 2023) yaitu :Logistik Pangan (Air Mineral dan Beras) 20 Paket, Mie Instant 20 Dos, Selimut BNPB 10 Lembar, Makanan Siap Saji 18 Paket dan Sabun Mandi BNPB 2 Dos.

Dokumentasi Penyaluran Bantuan Logistik

d. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

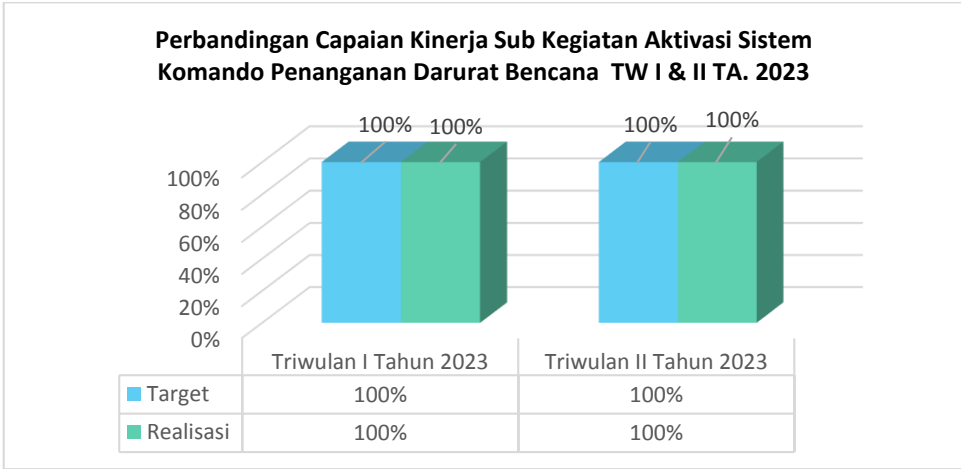

Grafik. 23
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Dengan perhitungan bahwa koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan Januari s.d Juni 2023 sebanyak 39 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 10.000.000,- Namun realisasi keuangan sampai pada triwulan II masih 0%, hal ini disebabkan karena anggaran sifatnya disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat.

e. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

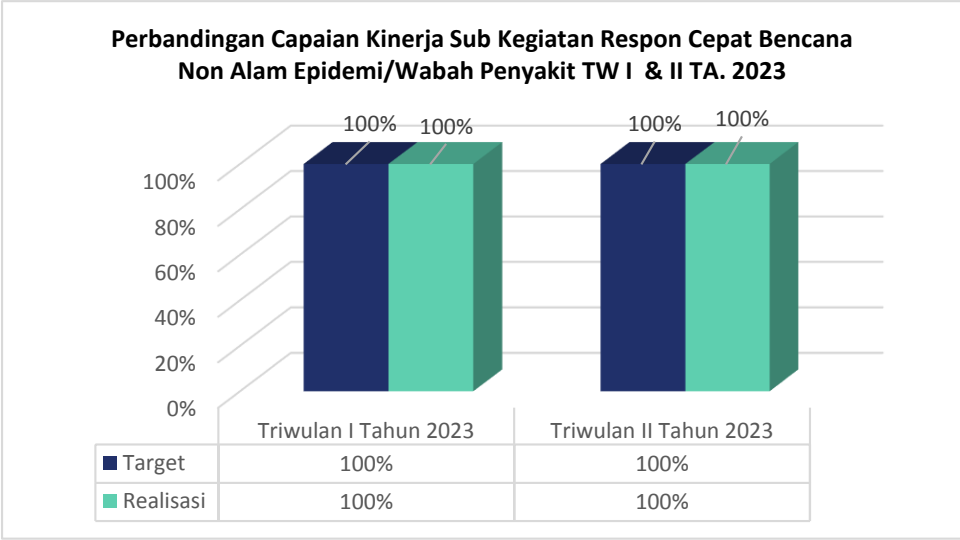

Grafik. 24
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator sub kegiatan adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% dan realisasi 100%, persentase capaian kinerja 100%. Pada periode Triwulan II Tahun 2023 tidak terdapat laporan masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) yang diterima oleh TRC BPBD. Namun BPBD tetap siaga dalam mengantisipasi jika sewaktu-waktu terdapat korban covid-19 dan akan direspon kurang dari 24 jam setiap laporan yang

diterima oleh TRC. Namun demikian, anggaran tetap disediakan untuk mengantisipasi kejadian bencana.

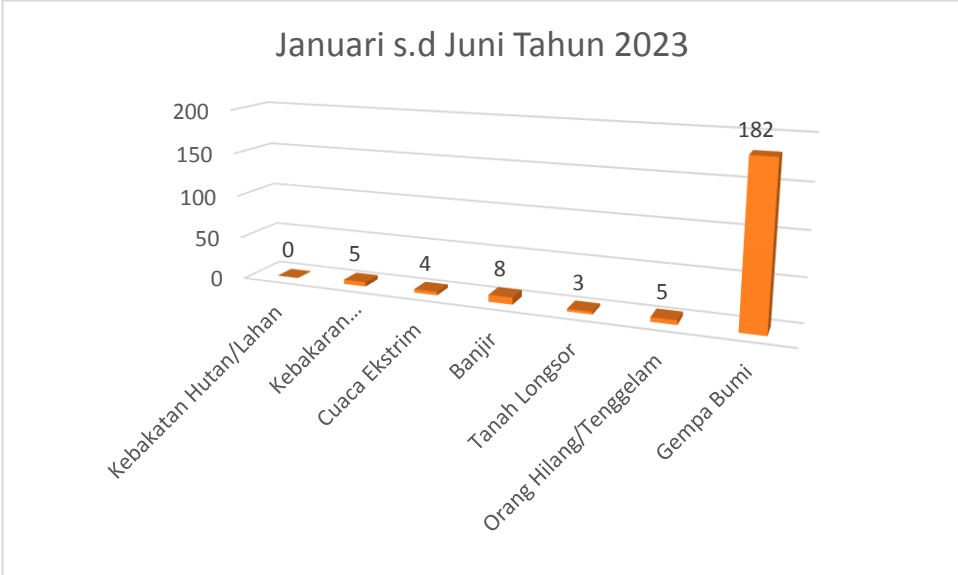

Grafik. 25
Data Kejadian Bencana Januari s.d Juni Tahun 2023

- ***Indikator 2***

  "Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota"

Tabel. 21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis II :	**Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana**			**Notifikasi**
Indikator Kinerja Sasaran	**Tahun 2023**			
	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95%	92,41%	92,41%	🔴

Keterangan : 🟢 Mencapai/Melampui Target ; 🔴 Belum Mencapai Target

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah "***Jumlah capaian kinerja program dibagi target sasaran dikali seratus".***

Target Indikator sasaran penunjang Triwulan II Tahun 2022 adalah 95% dan realisasi 92,41% dengan persentase capaian kinerja 97,27%. Persentase capaian kurang dari target karena terdapat kegiatan yang realisasinya < 100% yaitu Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Hal inilah yang mempengaruhi realisasi kinerja program secara keseluruhan.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daeraht
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDr
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Mebel
   b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

❖ **Hambatan/Kendala**

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
b. Terdapat jabatan fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana (pengurus barang) yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
c. Terdapat sub kegiatan yang sifatnya disediakan, yang penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kebutuhan
d. Keterlambatan proses administrasi keuangan

❖ **Solusi**

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog)
b. Mencermati rekening belanja untuk sub kegiatan yang sifatnya disediakan
c. Percepatan proses administrasi keuangan
d. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan
e. Melakukan persuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai

❖ **Efisiensi Anggaran**

Dalam pencapaian sasaran pendukung BPBD, dilakukan beberapa efisiensi angggaran yaitu :

a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada.
b. Efisiensi belanja internet kantor yaitu, untuk biaya WIFI kantor, difasilitasi oleh Dinas KOMINFO

❖ **Efisiensi Sumber Daya**

a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat, dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN.
b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN.

❖ **Analisis Efisiensi Sumber Daya**

Tabel. 22
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran II	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target TW II TA. 2023	Realisas TW II TA. 2023	Capaian (%)	Alokasi Anggaran s.d TW II TA. 2023	Realisasi s.d TW II TA. 2023	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	92,41%	97,27%	1.902.321.318,-	1.068.232.122,-	56,15%

Tabel. 23
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran II	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi Biaya
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,27%	56,15%	43,48%

Pencapaian sasaran pendukung sebesar 97,27% dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 56,15%, sehingga persentase efisiensi biaya adalah 43,48%. Adapun Persentase efisiensi biaya dapat hitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%\right]$$

2. Perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun sebelumnya

Adapun perbandingan antara target dan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 24
Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Sasaran II	**Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana**									Target Tahun 2026
Indikator Kinerja Sasaran	**Tahun 2022**			**Tahun 2023**			**Tahun 2023**			
	Target TW I	Realisasi TW I	Realisasi TW I	Target TW I	Realisasi TW I	Capaian	Target TW II	Realisasi TW II	Capaian	
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	95 %	96,11 %	101.16 %	95 %	92,34 %	97,2 %	95 %	92,41 %	97,27 %	100%

❖ **Analisis Capaian kinerja sasaran sebagai berikut :**

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat perbandingan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2023 dengan Triwulan sebelumnya mengalami penurunan hal ini disebabkan karena beberapa faktor yaitu :

a. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa karena terkendala proses belanja melalui e-catalog sedangkan tahun sebelumnya penggunaan e-catalog belum dilakukan sepenuhnya.
b. Terdapat beberapa jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang masih kosong sehingga mempemgaruhi realisasi kinerja dan keuangan
c. Beberapa sub kegiatan sifatnya disediakan, sehingga realisasinya Riil Cost
d. Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi keuangan (SPJ).

3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel. 25
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Terhadap Target Jangka Menengah (2021 - 2026)

Sasaran :	Meningkatnya layanan SPM sub urusan bencana		Target Akhir Renstra 2026	% Capaian s/d 2023 terhadap target akhir Renstra 2026
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi			
	Triwulan I Tahun 2023	rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2023		
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,41%	92,41%	100%	92,41%

Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung

Tabel. 26
Capaian Indikator Kinerja Program Pendukung

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target 2023	Target s.d TW II	Realisa s.d TW II	Capaian
I.	Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Terciptanya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang memadai	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	95%	95%	92,41%	97,27%
1.	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%
a.	Penyusunan Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah dokumen	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%

	Perencanaan Perangkat Daerah	perangkat daerah yang disusun tepat waktu	perencanaan yang disusun tepat waktu				
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	0 Dok	0 Dok	0%
c.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	2 Dok	1 Dok	1 Dok	100%
d.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	6 Dok	6 Dok	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	100%	87,5%	87,5%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	16 Org	16 Org	12 Org	75%
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD n	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 Dok	10 Dok	10 Dok	100%
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Persentase BMD yang diadministrasi sesuai standar	100%	100%	100%	100%
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100%
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang dilayani	100%	100%	150%	150%
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	10 Org	6 Org	9 Org	150%

5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	101,9%	101,9%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 Jenis	8 Jenis	7 Jenis	87,5%
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	17 Jenis	85%
c.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%
d.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 Expl	30 Expl	30 Expl	100%
e.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	275 Org	136 Org	135 Org	99,3%
f.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	41 Kali	20 Kali	28 Kali	140%
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi	100%	100%	60%	60%
a.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah mebel yang diadakan	5 Unit	5 Unit	4 Unit	80%
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan	6 Unit	6 Unit	0 Unit	0%
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0%

	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	atau bangunan lainnya yang diadakan				
d.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana prasana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pendukung dan sarana penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	91,83%	91,83%
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah surat masuk dan keluar yang diagenda	400 Surat	200 Surat	140 Surat	70%
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor yang terbayarkan	36 Rek	18 Rek	19 Rek	105.5%
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	2 Org	2 Org	2 Org	100%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang siap pakai	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	108,97 %	108,97% %
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dengan baik	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	13 Unit	13 Unit	10 Unit	76,92%
b.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	34 Unit	12 Unit	18 Unit	150%

c.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

❖ Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

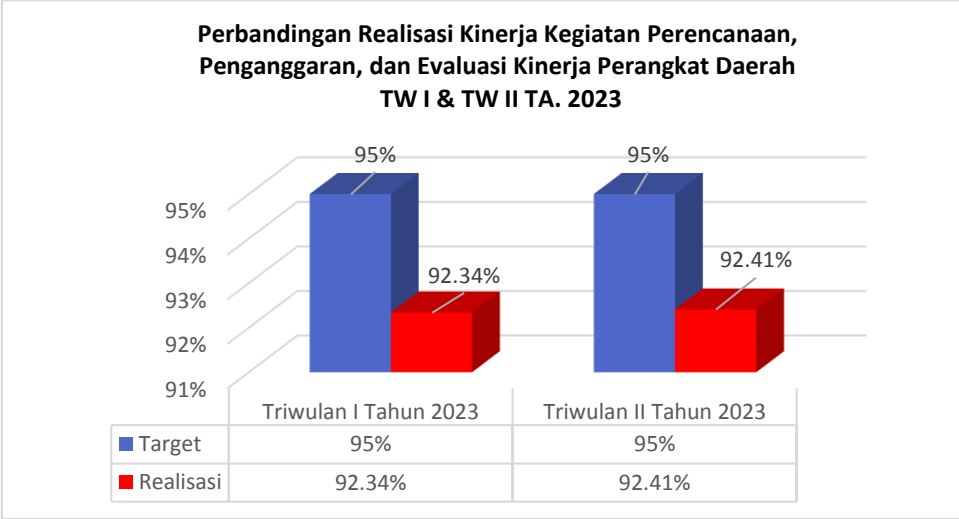

Grafik. 26
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator Program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar dengan ***formulasi : jumlah capaian kinerja seluruh kegiatan dibagi jumlah seluruh kegiatan dikali seratus***. Target 95% dan realisasi 92,41%% dengan capaian kinerja 97,27%, dan menyerap anggaran sebesar 56,15%. Capain kinerja program kurang dari target karena terdapat beberapa kegiatan capaianya kinerjanya <100%, sehingga berpengaruh terhadap kinerja program. Pencapaian Kinerja Program didukung oleh 8 kegiatan dan 24 sub kegiatan yaitu :

➢ **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Grafik. 27
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 100%. Target dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun s.d Triwulan II TA. 2023 sebanyak 8 dokumen dan terealisasi 8 dokumen yaitu Dokumen DPA TA. 2023, Lapkin Tahun 2022, LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022 dan Laporan Evaluasi RKPD TW 1 TA. 2023, Renja Pokok 2024, Evaluasi Kinerja TW 1, Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

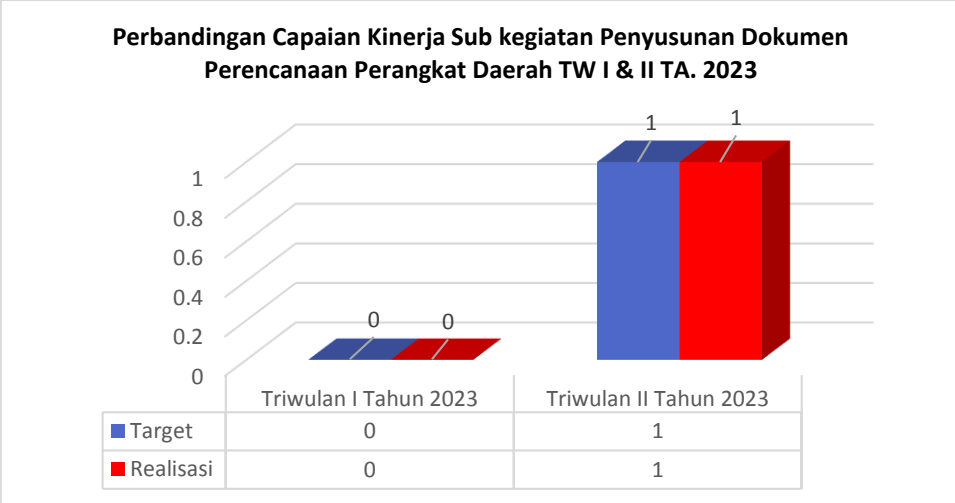

Grafik. 28
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan direncanakan target pada triwulan II TA. 2023 sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%) yaitu Dokumen renja 2024. Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 19.675.300, terdiri dari Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Honorarium Pejabat Perencana SKPD)Rp 4.500.000, belanja ATK sebesar Rp. 800.000, belanja Kertas Cover Rp 375.300 ,belanja cetak Rp 1.250.000, Belanja Bahan Komputer Rp 1.130.000 , dan belanja makan dan minum rapat Rp 3.150.000. Namun realisasi keuangan masih 24,40%. Terdapat SPJ makan minum rapat, perjalanan dinas yang belum di GU-kan senilai Rp 5.300.000 yang belum di GU-kan.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

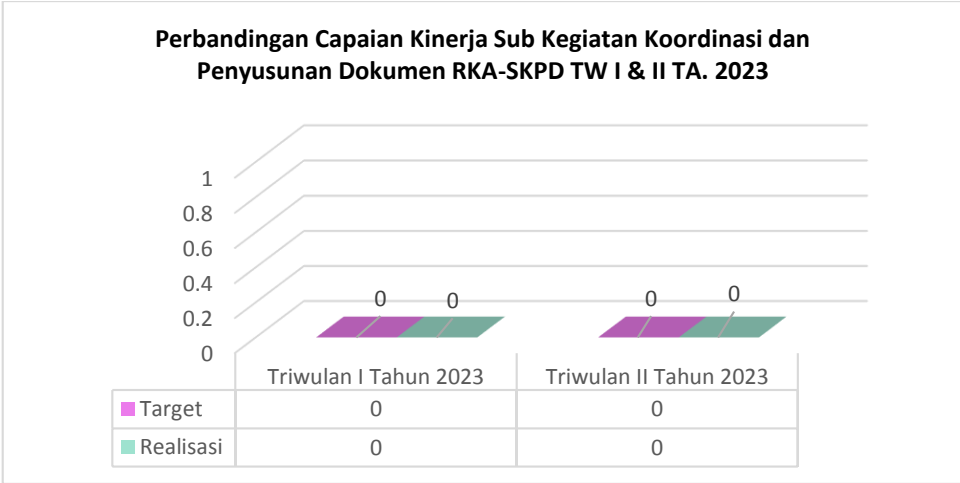

Grafik. 29
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu, dengan target sebanyak 2 dokumen dan direncanakan pada Triwulan III TA. 2023.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

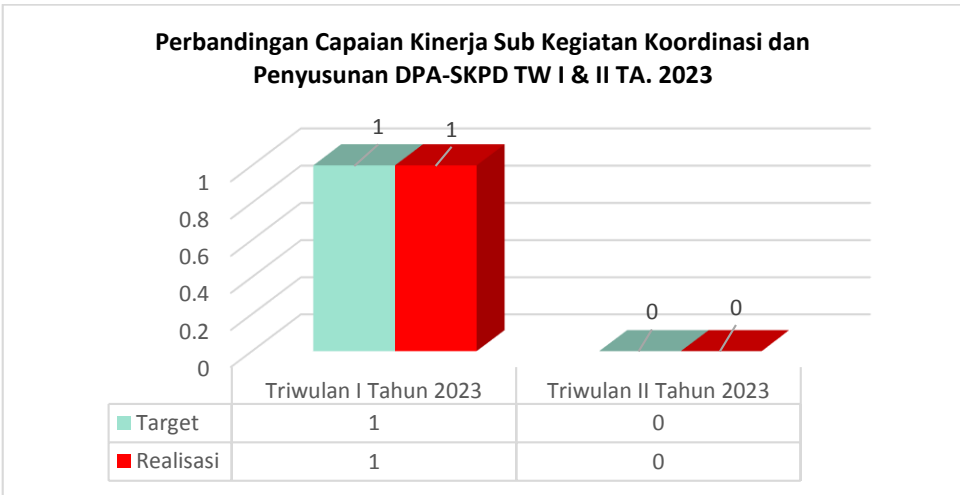

Grafik. 30
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu, dan target pada s.d Triwulan II TA. 2023 sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 Dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%, terdiri dari dokumen DPA-SKPD TA. 2023. Disediakan anggaran

kas pada triwulan I sebesar Rp 2.568.340, terdiri dari belanja ATK Rp 449.500, Belanja Kertas Cover Rp 261.840, belanja cetak Rp 1.200.000, dan Belanja Bahan Komputer Rp 657.000. Realisasi keuangan masih 0%. Terdapat SPJ senilai Rp 1.500.000 yang belum di GU-kan.

d. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

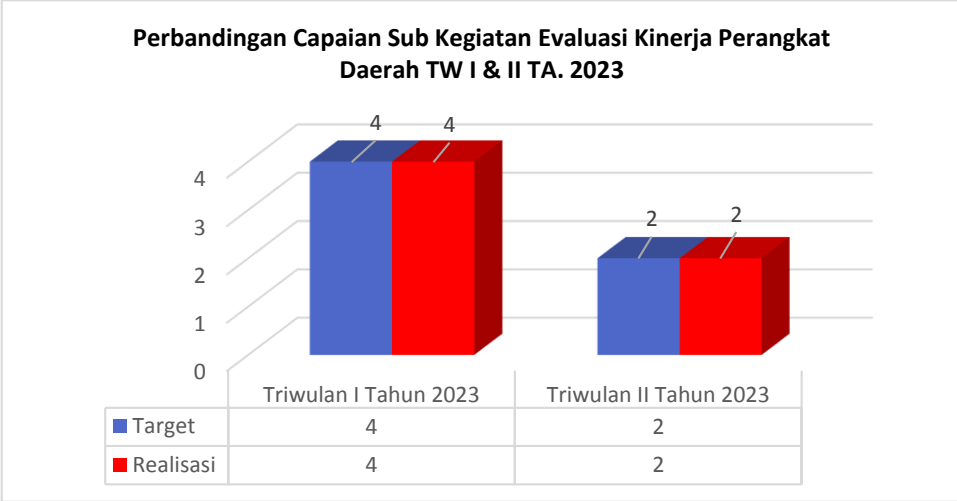

Grafik. 31
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu, target pada triwulan II TA. 2023 sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% yaitu Dokumen Evaluasi Kinerja TW 1 TA. 2023 dan RKPD Triwulan I TA. 2023. Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 15.836.300, terdiri dari belanja ATK Rp 800.000, Belanja Kertas Cover Rp 476.300 belanja cetak Rp 1.400.000, Belanja Bahan Komputer Rp 1.500.000 ,belanja makan dan minum rapat Rp 3.250.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 8.410.000. Realisasi keuangan masih Rp. 5.007.200 (31,62%). Terdapat SPJ yang belum di GU-kan sebesar Rp 7.200.000 yang belum di GU-kan.

Dokumentasi Monev Internal

➢ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

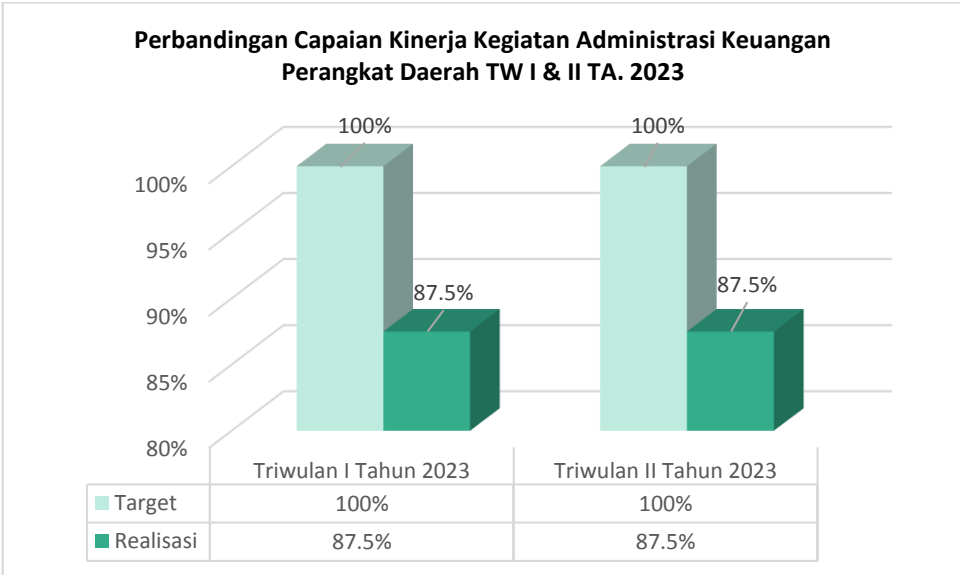

Grafik. 32
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kegiatan adalah persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 87,50% dengan persentase capaian kinerja 87,50%. Capaian kinerja yang tidak sesuai target karena dari 1 sub kegiatan yang dilaksanakan, salah satu sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan realisasinya hanya 75%, yang diakibatkan adanya beberapa jabatan struktural eselon II dan Fungsional serta Jabatan Pelaksana yang belum terisi personal, sehingga mempengaruhi realisasi kinerja dan keuangan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

e. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

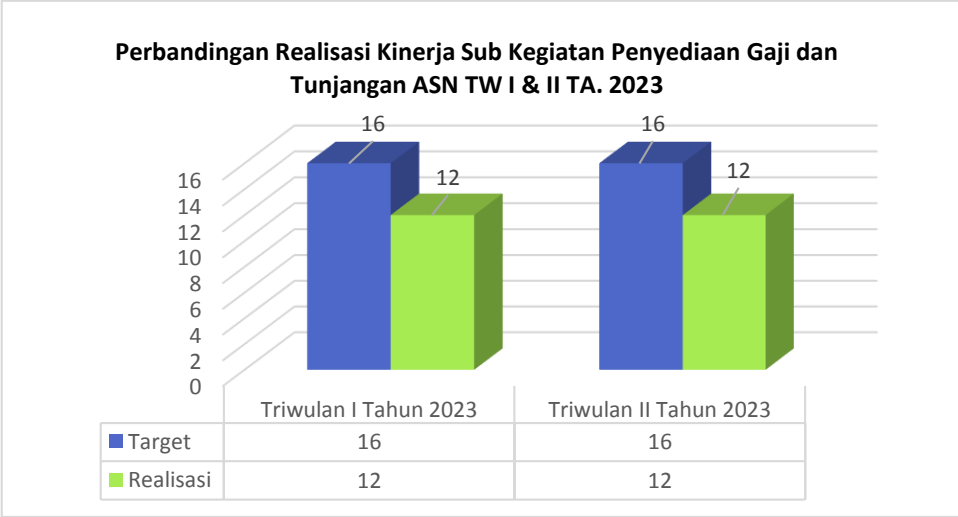

Grafik. 33
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan, target 16 org dan realisasi 12 org dengan persentase capaian kinerja 87,50 %. Target yang tidak tercapai karena adanya jabatan structural dan fungsional penyetaraan serta jabatan pelaksana yang belum terisi. Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 1.419.992.909 dan realisasi Rp 738.787.038 atau sebesar 52,03%. Terdapat sisa anggaran pada triwulan II yang cukup besar karena terdapat beberapa jabatan yang belum terisi sehingga berdampak pada realisasi keuangan.

f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

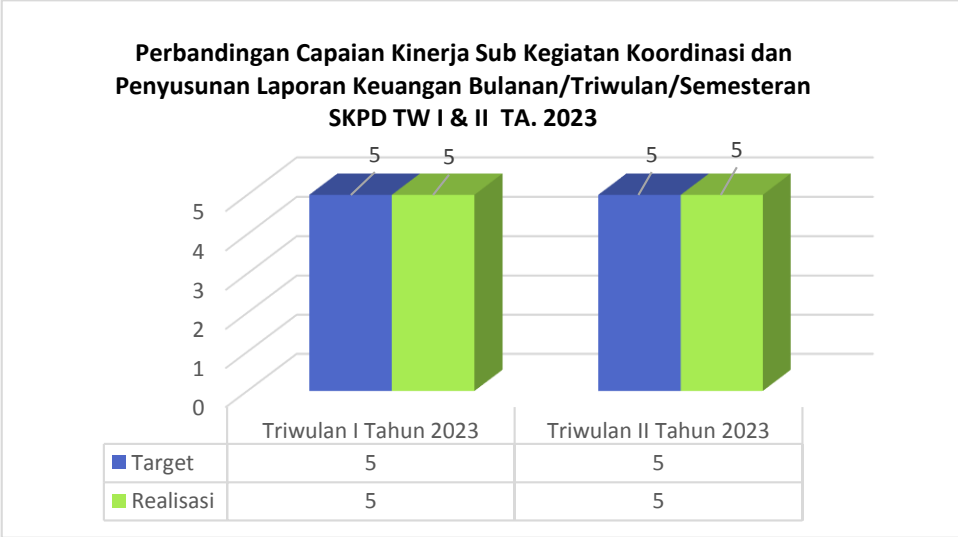

Grafik. 34
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu, dengan target Triwulan II sebanyak 5 dokumen dan realisasi 5 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100%. Dokumen yang disusun yaitu Laporan Bulanan Bendahara 3 dokumen, Laporan Triwulan II dan Laporan Semester 1. Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 21.081.200, terdiri dari belanja honor pengelola keuangan Rp 9.900.000, belanja ATK Rp 1.237.200, belanja kertas cover Rp 1.124.000, belanja cetak Rp 645.000, Belanja bahan komputer Rp 1.650.000,belanja makan dan minum rapat Rp 525.000 serta belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp 6.000.000. Realisasi keuangan 72,68%. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena SPJ untuk pengelola keuangan yang belum diGU-kan sebanyak Rp 1.650,000-.

➢ **Kegiatan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

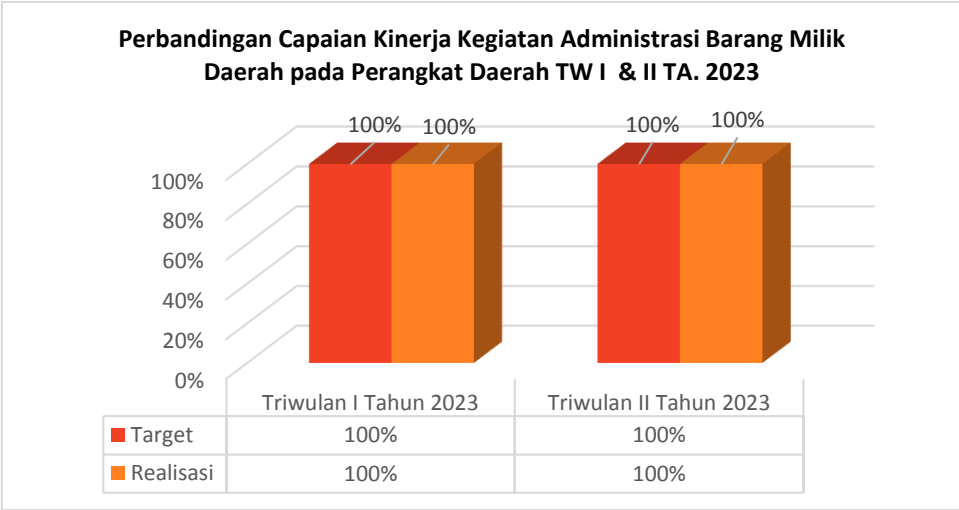

Grafik. 35
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja kegiatan adalah persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 100%. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

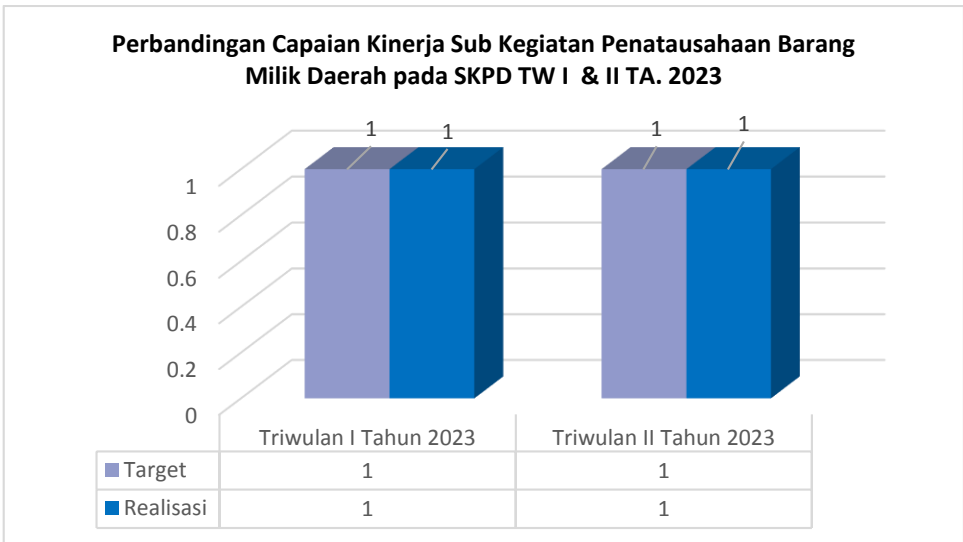

Grafik. 36
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun, dengan

target Triwulan II TA. 2023 sebanyak 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen (100%). Dokumen yang disusun adalah Laporan penatausahaan BMD sebanyak 1 dokumen (TW II). Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 10.483.300, terdiri dari belanja honor pengurus barang Rp 6.300.000, belanja ATK Rp 452.300, Belanja kertas cover Rp 250.000, belanja cetak Rp 350.000, belanja bahan komputer Rp 461.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 2.670.000. Realisasi keuangan 59,52%. . Disediakan anggaran perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan BMD, namun tidak realisasi karena penyusunan laporan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

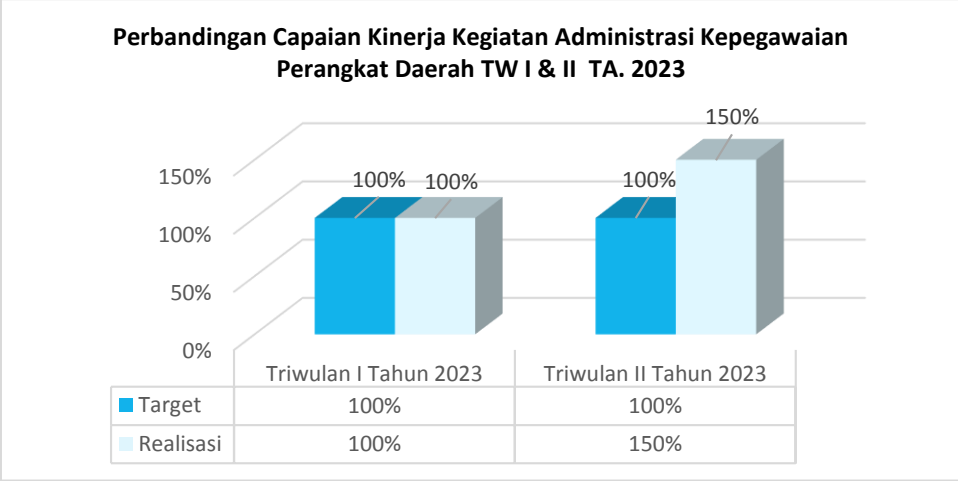

Grafik. 37
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 150% dengan persentase capaian kinerja 150%. Capaian kinerja melebihi target karena pada triwulan I, karena pelaksanaanya menyesuaikan dengan surat undangan/pemanggilan peserta. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

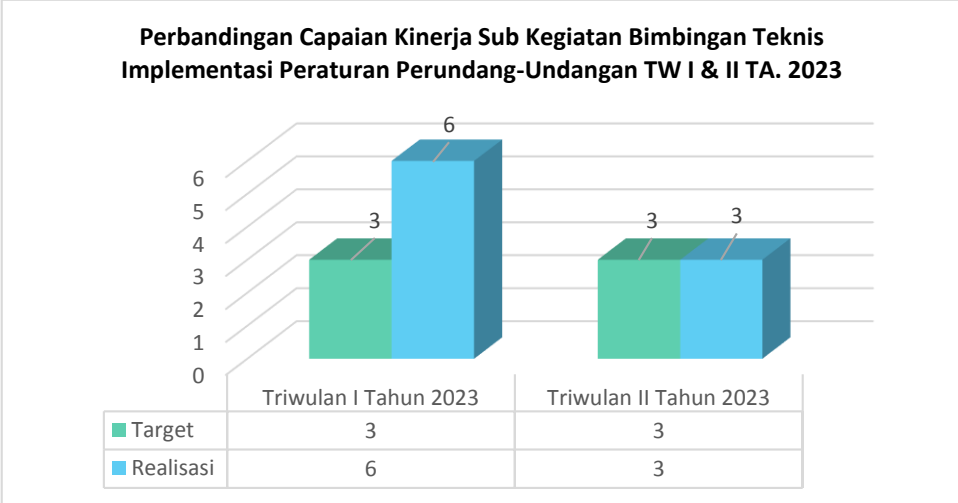

Grafik. 38
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, dengan target s.d TW II TA 2023 sebanyak 6 org dan realisasi 9 orang dengan persentase capaian kinerja 100%. Adapun bimtek/diklat yang diikuti yaitu Workshop Aplikasi SIRUP 1 org, Aplikasi Gaji 2 org, Pelatihan Water Rescue 1 orang, Bimtek RPB 2 orang dan Pelatihan PUSDALOPS 3 org. Disediakan anggaran kas pada triwulan I sebesar Rp 22.610.000, teridir dari belanja kontribusi bimtek Rp 10.000.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 12.610.000. Realisasi keuangan masih 50,02%. Terdapat SPJ senilai Rp 8.500.000 yang belum di GU-kan karena keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas bimtek.

➢ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

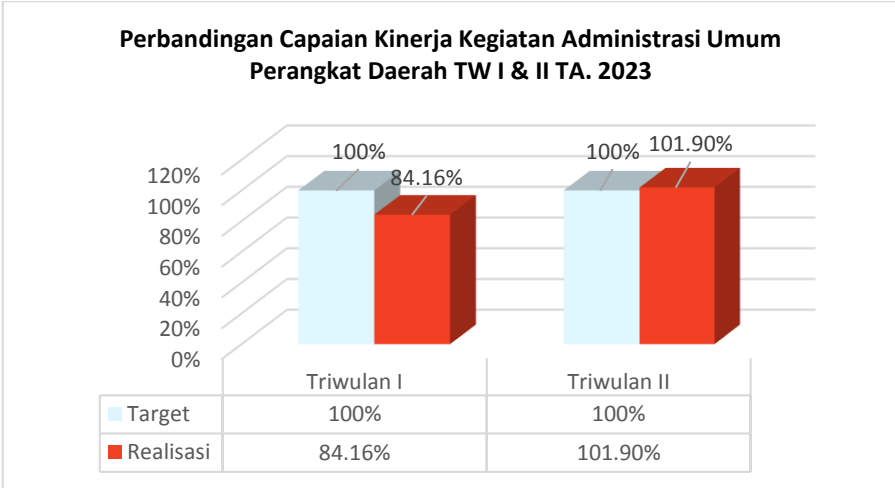

Grafik. 39
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata- Rata Capaian Kinerja administrasi umum Perangkat Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target Triwulan II TA. 2023 adalah 100% dan realisasi 101,9% dengan persentase capaian kinerja 101,9%. Capaian kinerja melebihi target karena dari 6 sub kegiatan yang dilaksanakan, terdapat 1 sub kegiatan capaian >100%, dan capaian tersebut mempengaruhi capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

c. Sub Kegiatan Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

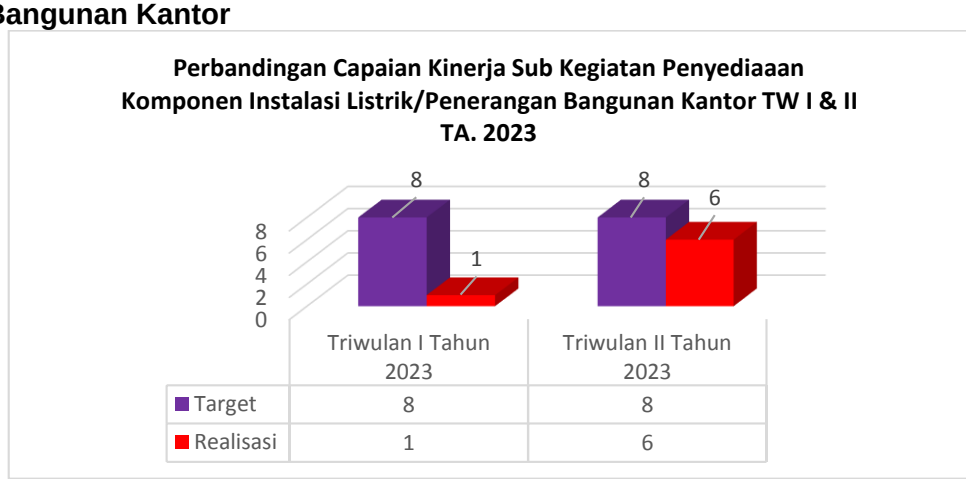

Grafik. 40
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan, target 8 jenis, dan

terealisasi 7 jenis (87,5%). Dan disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 6.312.500,- yaitu belanja komponen alat listrik, dan realisasi keuangan 0%. Hal ini karena terdapat SPJ yang belum dipertanggungjawabkan.

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

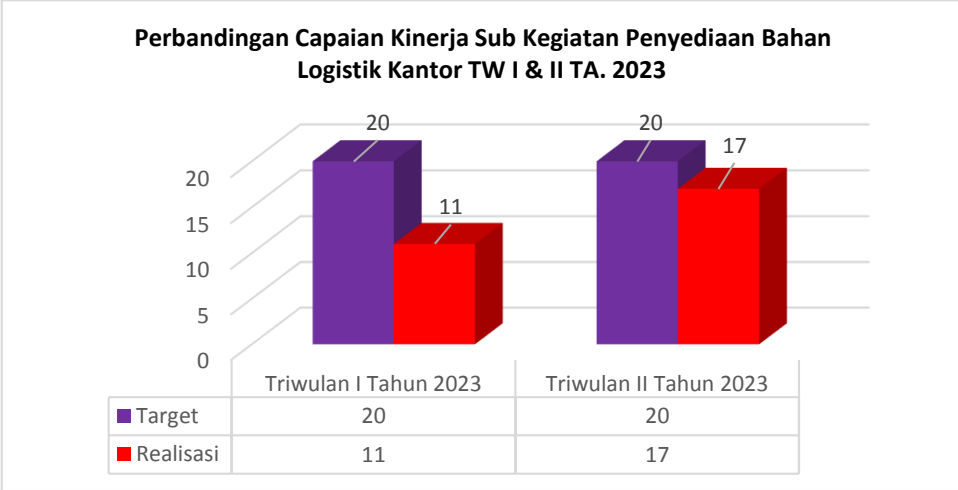

Grafik. 41
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 20 jenis dan realisasi 17 jenis 85%) terdiri dari BBM operasional, Oli Pelumas, alat & bahan pembersih 15 jenis (sendok sampah, stella matic, sabun cair, Tissu refil, Harpic, Pembersih lantai, keranjang sampah, alat pel, sapu, stella refil dll). Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 12.116.250, terdiri dari belanja BBM/Pelumas Rp 8.616.250 dan belanja alat dan bahan pembersih Rp 3.500.000. Realisasi keuangan Rp 11.103.000 atau sebesar 91,06%.

e. Sub Kegiatan Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan

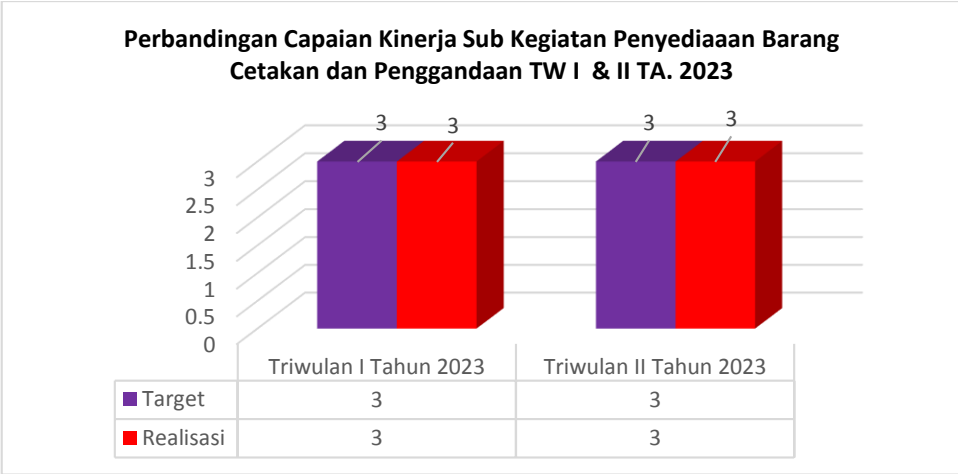

Grafik. 42
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan, target 3 jenis setiap triwulan dan realisasi 3 jenis (100%) terdiri dari penggandaan, cetak dan jilid. Disediakan anggaran kas pada triwulan I sebesar Rp 14.450.000, dan realisasi keuangan 11,71% , terdapat SPJ belanja baliho untuk papan himbauan sebesar Rp 9.000.000 yang masih dalam proses pencairan.

f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

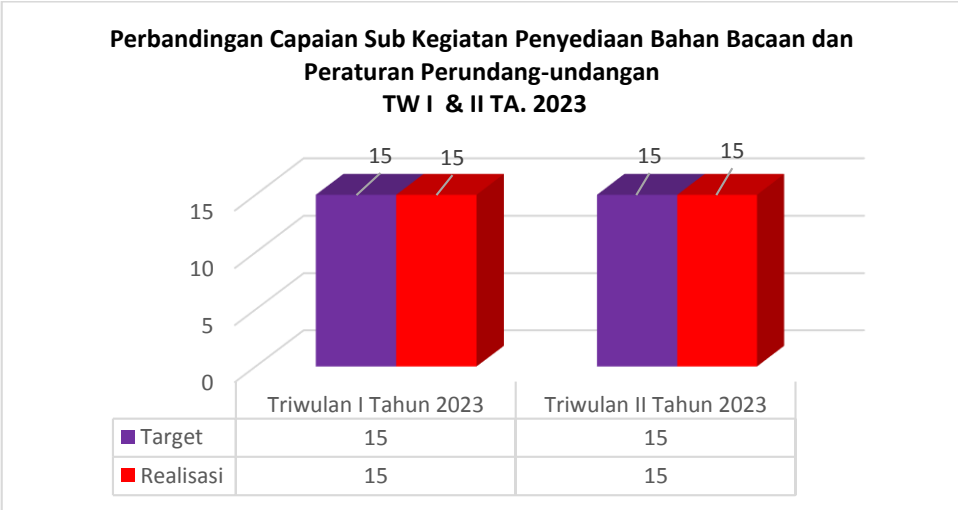

Grafik. 43
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, target s.d TW II TA. 2023 sebanyak 30 exp dan terealisasi 30 ekpl dengan capaian kinerja 100%, terdiri dari Koran lokal 6 expl, Koran Nasional 6 expl dan Koran Regional 18 expl. Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 3.360.000, dan realisasi keuangan Rp 2.040.000 atau sebesar 60,71%, terdapat SPJ pembayaran koran untuk bulan juni yang belum diGU-kan tsebesar Rp 1.320.000.

g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

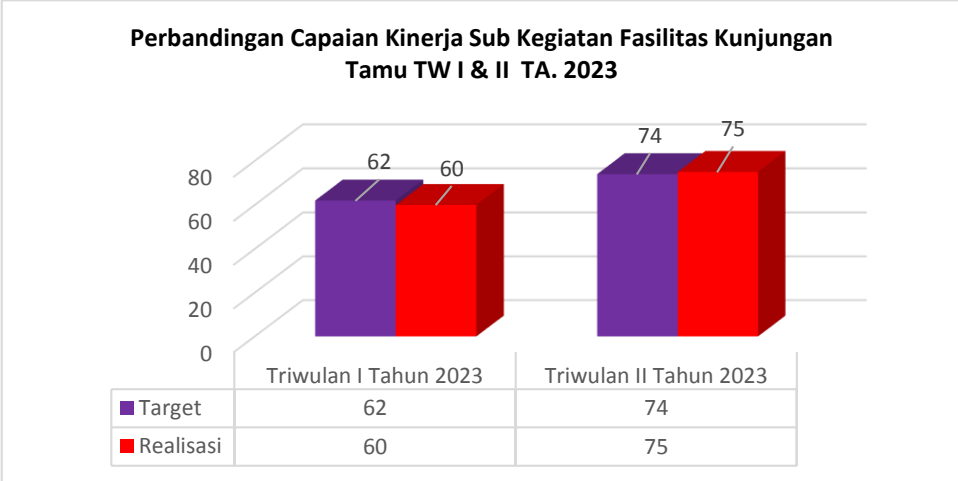

Grafik. 44
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dengan target pada TW II TA. 2023 sebanyak 74 org dan terealisasi 75 org dengan capaian kinerja 101,35%. Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 7.350.000, yaitu belanja makan minum tamu Rp 3.350.000 dan realisasi keuangan Rp 7.265.000 atau 98,84%.

h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

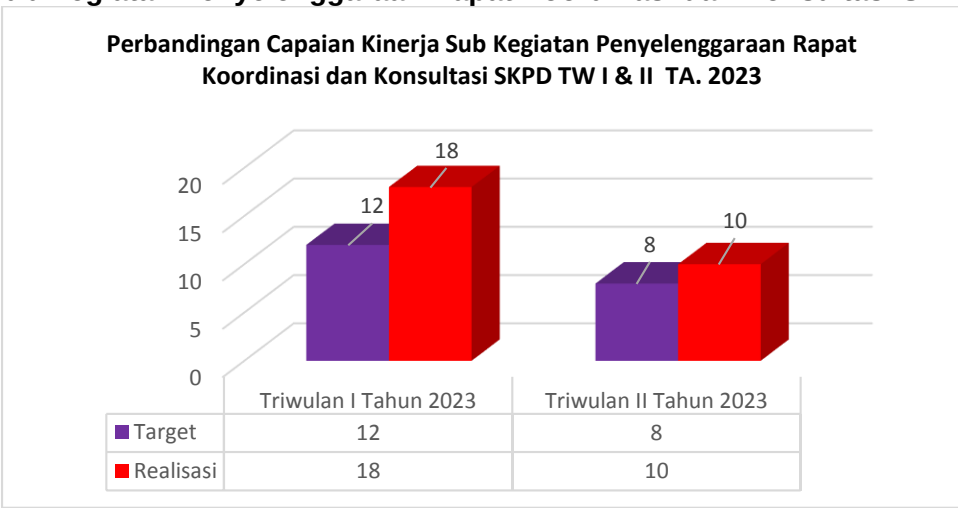

Grafik. 45
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target TW II TA. 2023 sebanyak 8 kali dan terealisasi 10 kali dengan capaian kinerja 125%. Capaian yang melebihi dari target disebabkan terdapat beberapa kegiatan penting yang perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait. Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 154.782.400, terdiri dari belanja jasa upah jasa sopir Rp 18.000.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 136.782.400 dan realisasi keuangan 93,14%.

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

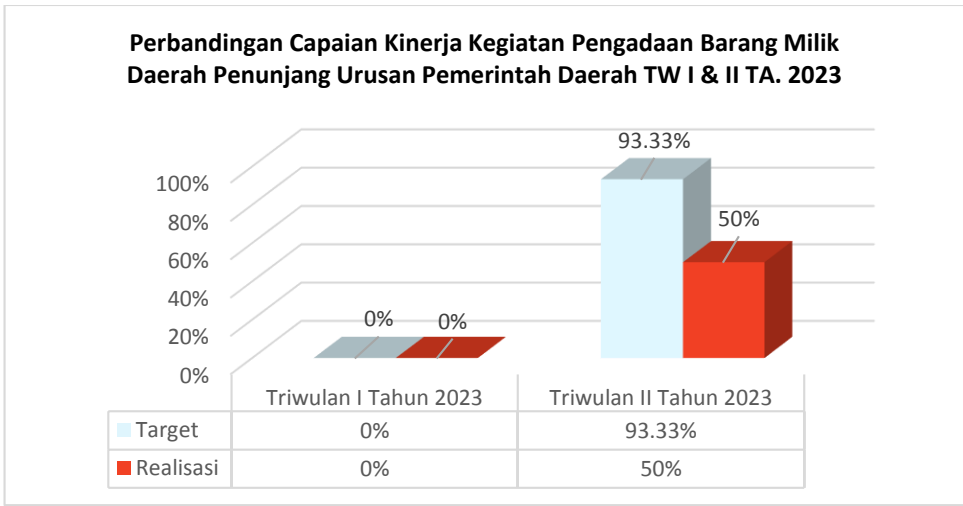

Grafik. 46
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase BMD-Perangkat Daerah penunjang yang terpenuhi, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target TW II TA. 2023 sebesar 93,33% dan realisasi 50%. Pencapaian target kinerja direncanakan pada Triwulan II & III TA. 2023. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Pengadaan Mebel

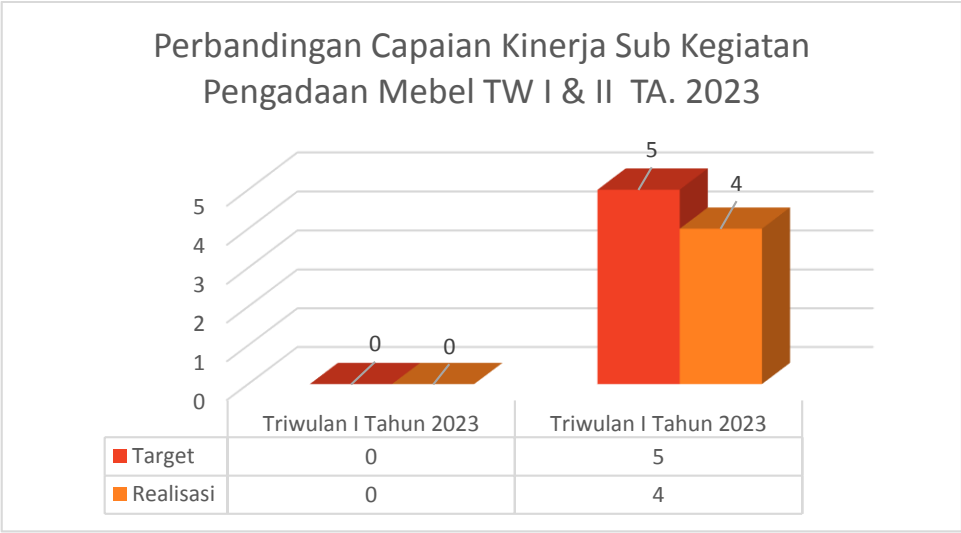

Grafik. 47
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan, Target pada Triwulan II TA. 2023 sebanyak 5 unit dan realisasi 4 unit (80%). Terdapat pengadaan 1 unit lemari display yang belum realisasi karena ukuran lemari yang dibutuhkan belum tersedia di e-catalog, dan saat masih dalam pencarian barang sesuai spek yang direncanakan.

b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

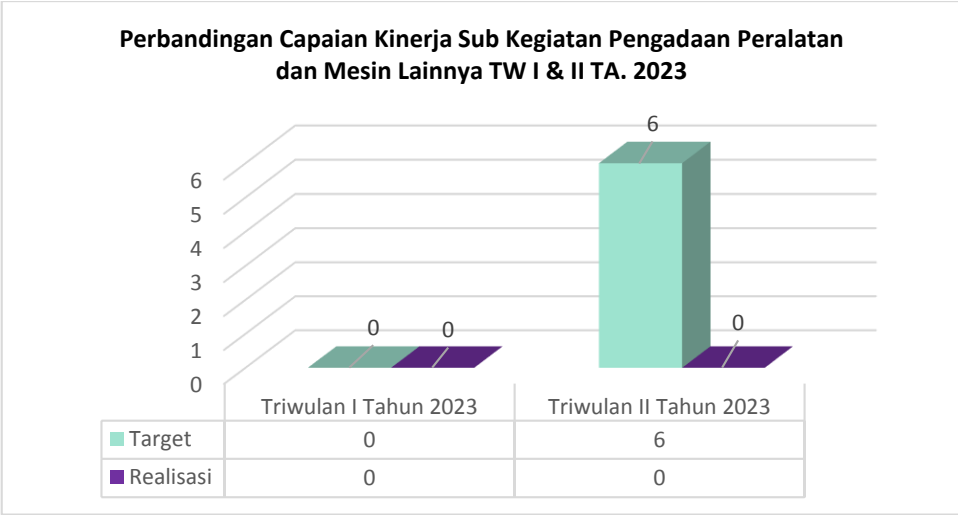

Grafik. 48
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan, target Triwulan II TA. 2023 adalah 6 unit dan terealisasi 0 unit (0%). Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan ini direncanakan pada Triwulan II TA. 2023, dan saat ini masih dalam proses pencarian penyedia dan jenis barang sesuai TKDN dalam e-catalog Nasional dan belum dapat direalisasikan karena harga di e-catalog lebih tinggi dari standar biaya masukan sehingga untuk diusulkan pada perubahan anggaran

c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Grafik. 49
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan. Dan berdasarkan anggaran kas, pencapaian target kinerja pada Triwulan III TA. 2023.

d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

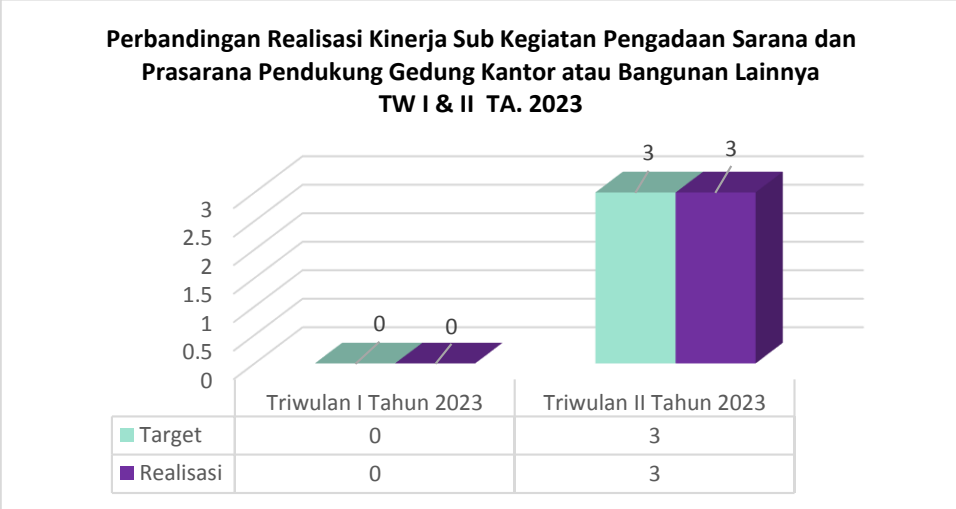

Grafik. 50
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan. Target kinerja pada Triwulan II TA. 2023 sebanyak 3 unit dan realisasi 3 unit (100%) yaitu Pengadaan AC 2 unit dan TV Monitor 1 unit.

➢ **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

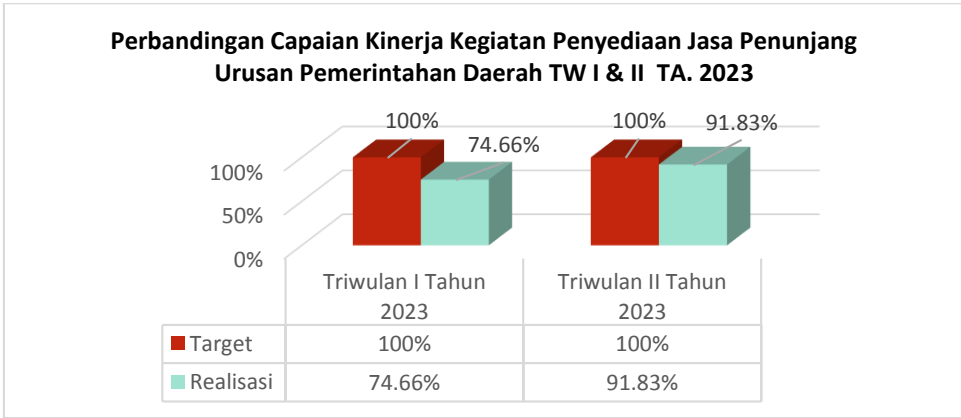

Grafik. 51
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus***. Target 100% dan realisasi 91,83% dengan persentase capaian kinerja 91,83%. Capaian kurang dari target karena terdapat 1 sub kegiatan yang capaian kinerjanya <100% sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja kegiatan secara keseluruhan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

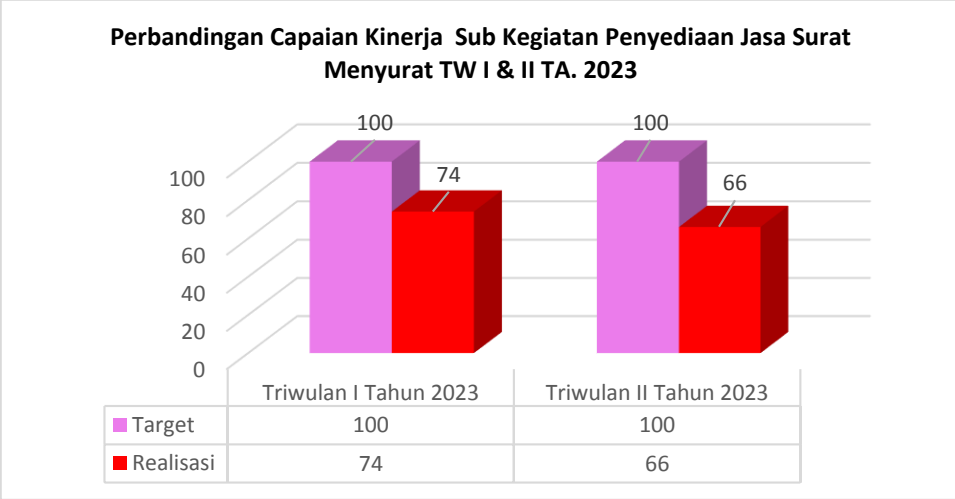

Grafik. 52
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, target Triwulan II TA. 2023 sebanyak 100 surat dan terealisasi 66 surat dengan persentase capaian kinerja 66%. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 3.132.475,- terdiri dari belanja ATK Rp 1.150.560, belanja kertas cover Rp 469.915, belanja benda pos (materai) Rp 500.000 belanja bahan komputer Rp 912.000 dan belanja paket/pengiriman Rp 100.000 Dengan realisasi keuangan 15,96%. Terdapat SPJ yang belum di GU-kan senilai Rp 1.100.000 yang belum di GU-kan.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

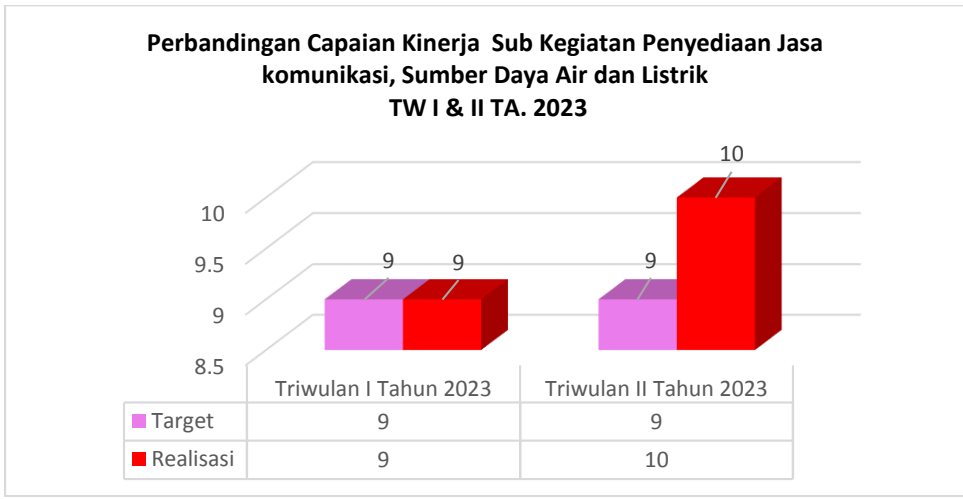

Grafik. 53
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, target kinerja Triwulan II TA. 2023 sebanyak 9 rekening dan realisasi 10 rekening dengan persentase capaian kinerja 111,1%. terdiri dari RekeningListrik BPBD 3 rekening, Token Listrik 1 rekening, Air kantor 3 rekening, kartu halo 3 rekening. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 31.210.344,- terdiri dari belanja Telepon Rp 4.100.000,- belanja air Rp 3.002.400,- dan belanja listrik Rp 24.007.944 .Realisasi keuangan Rp 17.855.853 atau 57,21%. Hal ini disebabkan terdapat SPJ bulan Juni yang belum di-GUkan.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

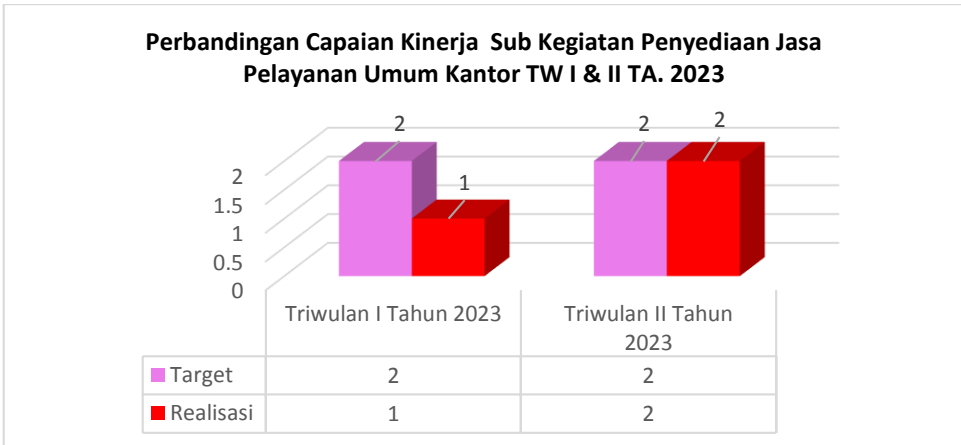

Grafik. 54
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan, target TW II TA. 2023 sebanyak 2 orang dan realisasi 2 orang (100%). Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 9.900.000,-.Terdiri dari pejabat pengadaan Rp 2.400.000 dan belanja honor upah jasa cleaning service honor Rp 7.500.000. Realisasi keuangan Rp 7.850.000 atau 79,29%. Realisasi kurang dari target karena honor pejabat pengadaan berlaku bulan Februari 2023 dan terdapat sisa anggaran gaji upah jasa celaning service yang seharusnya dianggarkan hanya 5 bulan tetapi dianggarkan 6 bulan.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

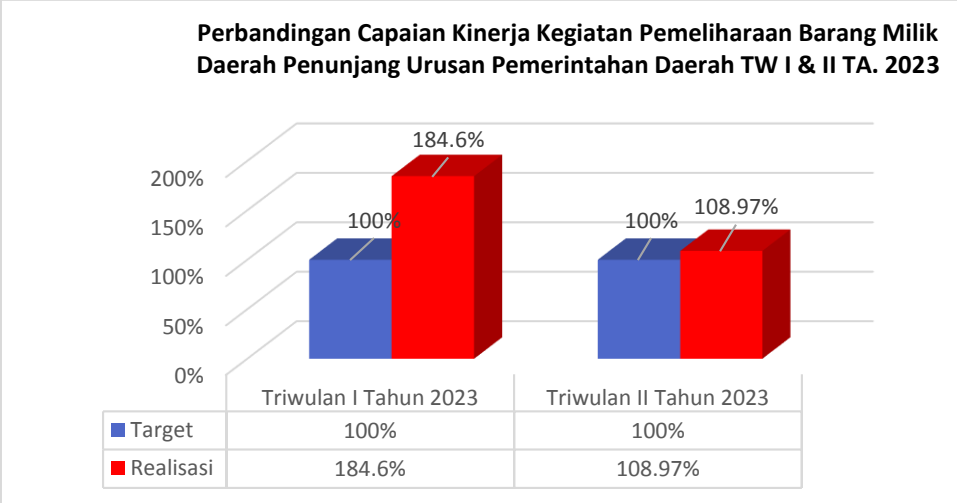

Grafik. 55
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja kegiatan adalah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan ***Formulasi : Jumlah capaian kinerja seluruh sub kegiatan dibagi jumlah seluruh sub kegiatan dikali seratus.*** Target 100% dan realisasi 108,97% dengan persentase capaian kinerja 108,97%. Capaian kinerja Kegiatan Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah melebihi target karena dari 3 sub kegiatan pengampuh, terdapat 1 sub kegiatan yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya capain kinerjanya lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena ketersediaan anggaran bisa untuk membiayai lebih dari target yang direncanakan, faktor yang mempengaruhinya adalah SBM untuk 1 unit peralatan bisa untuk membiayai beberapa peralatan lainnya. Dan pada

dasarnya BMD yang dipelihara adalah yang mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan. Pencapaian kinerja kegiatan didukung oleh :

- **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

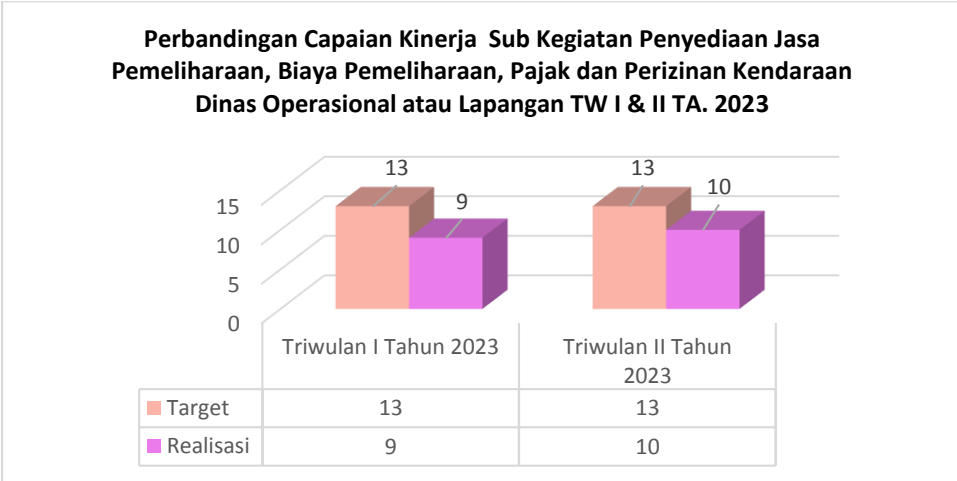

Grafik. 56
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara, target pada TW II TA. 2023 sebanyak 13 unit dan realisasi 10 unit dengan persentase capaian kinerja 76,92%. Adapun kendaraan dinas yang dipelihara yaitu Rescue 1 unit, Hilux 1 unit, Truk Serbaguna 1 unit, Mobil Operasional TRC 1 unit dan motor 6 unit. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 52.200.000,- terdiri dari belanja jasa pemeliharaan kendaraan perorangan Rp 7.200.000,- belanja jasa pemeliharaan kendaraan penumpang Rp 45.000.000,-. Realisasi keuangan Rp. 49.955.000 atau 95,70%. Pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi kendaraan dinas yang memerlukan pemeliharaan/perbaikan.

- **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

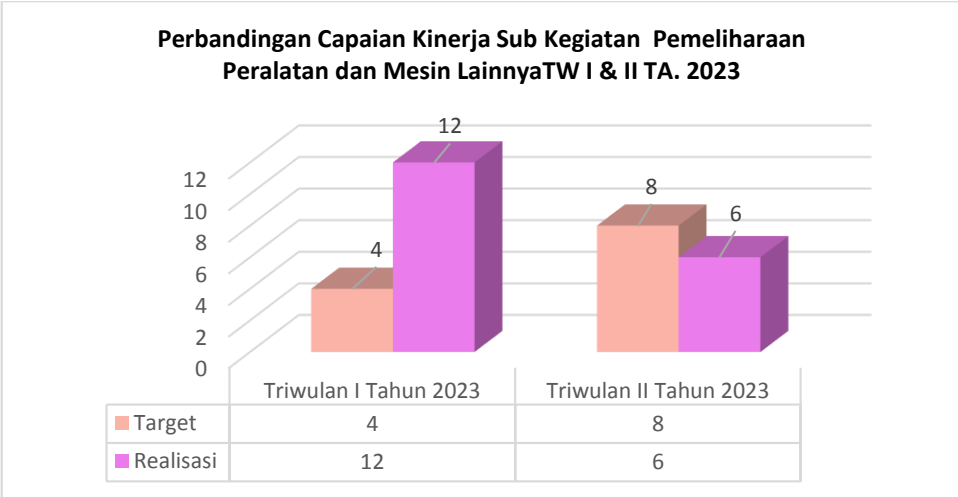

Grafik. 57
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara, target TW II TA. 2023 sebanyak 8 unit dan terealisasi 6 unit dengan persentase capaian kinerja 75%. Adapun peralatan yang mengalami perbaikan yaitu AC 3 unit dan chainsaw 3 unit. Capaian yang melebihi target karena besaran anggaran yang disediakan untuk setiap unit peralatan sesuai dengan SBM, cukup untuk membiayai lebih dari 1 unit peralatan. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 9.390.000,- belanja pemeliharaan genset Rp 2.250.000 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Rp 2.750.000 dan belanja pemeliharaan personal komputer Rp 3.690.000. Realisasi keuangan 20,13%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.

- **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

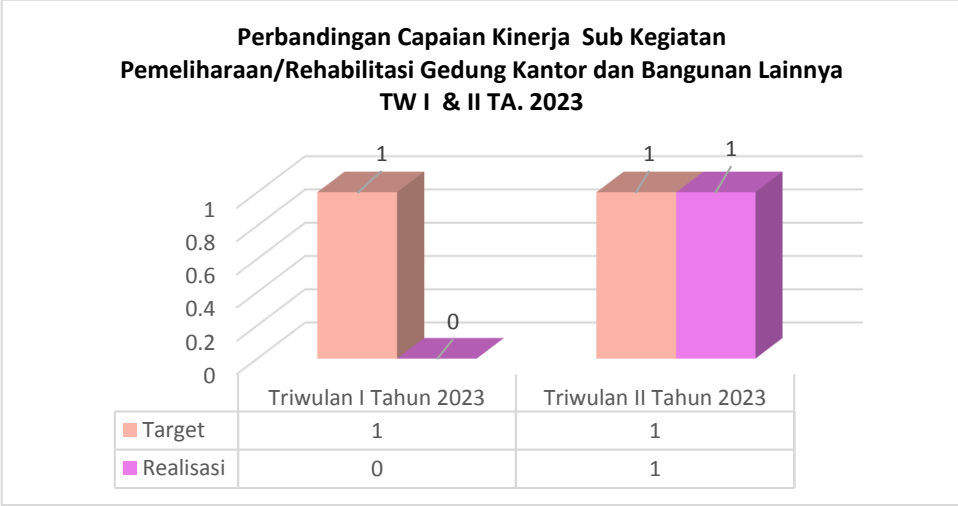

Grafik. 58
Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I & II TA. 2023

Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi, target 1 unit dan realisasi 1 unit (100%). Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan. Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 5.000.000,- Realisasi keuangan 20,36%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan.

3.3 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan serta analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Anggaran APBD untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 adalah sebesar sebesar **Rp. 4.565.959.550,-** *(Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah),* terdiri dari belanja pegawai **Rp 2.113.296.135,-** belanja barang dan jasa **Rp. 2.194.333.415**,- dan belanja modal **Rp 258.330.000,-**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 program, 12 kegiatan serta 41 sub kegiatan. Adapun target anggaran pada Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dan realisasi dapat

dilihat pada grafik berikut ini :

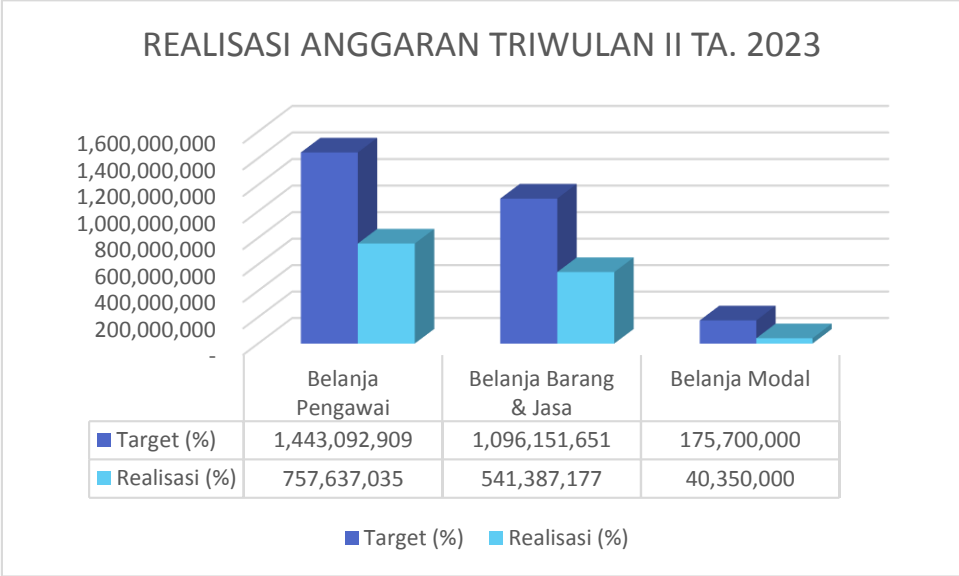

Grafik. 59
Realisasi Anggaran Triwulan II TA. 2023

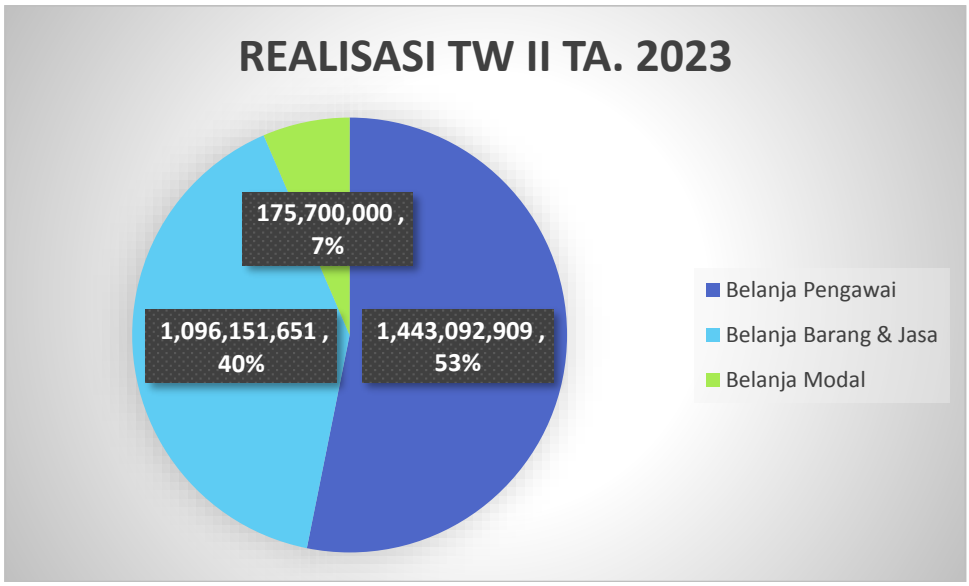

Diagram.1 Persentase Serapan Anggaran Triwulan II TA. 2023

Tabel. 27
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran Rp	Target Triwulan s.d (Berdasarkan Anggaran Kas)	Realisasi Anggaran sd 30 Juni 2023		Selisih		Total Sisa Anggaran	
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
					(6/5*100)	(5-6)	(8/5*100)	(4-6)	(10/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	**4,565,959,550**	**2.714.944.560**	**1.339.347.212**	49.33	1.375.570.348	50.56	3.226.585.338	70.67
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**	**3,005,325,018**	**1.902.321.318**	**1.068.232.122**	56.15	834.089.196	43.85	1.937.092.896	64.46
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**78,031,920**	**38.079.940**	**10.893.600**	28.61	27.186.340	71.39	67.138.320	86.04
	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37,789,300	19.675.300	4.800.000	24.40	14.875.300	75.60	32.989.300	87.30
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4,925,200						4,925,200	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4,354,340	2.568.340	1.056.400	42.30	1.481.940	57.70	3.267.940	75.05
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,963,080	15.836.300	5.007.200	31.62	10.829.100	68.38	25.955.880	83.83
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,107,340,335**	**1.441.074.109**	**754.108.235**	52.33	686.965.874	47.67	1.353.232.100	64.22
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,067,096,135	1.419.992.909	738.787.035	52.33	681.205.874	47.97	1.328.309.100	64.26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	40,244,200	21.081.200	15.321.200	72.68	5.760.000	27.32	24.923.000	61.93
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**17,949,800**	10.483.300	6.239.700	59.52	4.243.600	40.48	11.710.100	65.24
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**17,949,800**	10.483.300	6.239.700	59.52	4.243.600	40.48	11.710.100	65.24
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**35,500,000**	22.610.000	11.308.686	50.02	11.301.314	49.98	24.191.314	68.14
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35,500,000	22.610.000	11.308.686	50.02	11.301.314	49.98	24.191.314	68.14
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**393,759,800**	**198.371.150**	**166.263.048**	83.81	32.108.102	16.19	227.496.752	57.78
	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12,625,000	6.312.500			6.312.500	100	12,625,000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	12.116.250	11.103.000	91.64	1.013.250	8.36	13.897.000	55.59
	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25,000,000	14.450.000	1.692.000	11.71	12.758.000	88.29	23.308.000	93.23
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,720,000	3.360.000	2.040.000	60.71	1.320.000	39.29	4.680.000	69.64
	Fasilitas Kunjungan Tamu	14,850,000	7.350.000	7.265.000	98.84	85.000	1.16	7.585.000	51.08
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309,564,800	154.782.400	144.163.048	93.14	10.619.352	6.86	165.401.752	53.43
6	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**163,500,000**	**80.870.000**	**40.350.000**	49.89	40.520.000	50.11	123.150.000	75.32
	Pengadaan Mebel	15,000,000	15.000.000	7.250.000	48.33	7.750.000	51.67	7.750.000	51.67
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30,000,000	30,000,000			30,000,000	100	30,000,000	100.00

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	85,000,000	2.370.000			2.370.000	100	85,000,000	100.00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukun Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33,500,000	33,500,000	33.100.000	98.81	400.000	1.19	400.000	1.19
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**86,403,163**	44.242.819	26.205.853	59.23	18.036.966	40.77	60.197.310	69.67
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,182,475	3.132.475	500.000	15.96	2.632.475	84.04	3.682.475	88.05
	Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62,420,688	31.210.344	17.855.853	57.21	13.354.491	42.79	44.564.835	71.39
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19,800,000	9.900.000	7.850.000	79.29	2.050.000	20.71	11.950.000	60.35
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah**	**122,840,000**	**66.590.000**	**52.863.000**	79.39	13.727.000	20.61	69.977.000	56.97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93,300,000	52.200.000	49.955.000	95.70	2.245.000	4.30	43.345.000	46.46
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,540,000	9.390.000	1.890.000	20.13	7.500.000	79.87	17.650.000	90.33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	5.000.000	1.018.000	20.36	3.982.000	79.64	8.982.000	89.82
II	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**1,560,634,532**	**812.623.242**	**271.142.090**	33.37	541.481.152	66.63	1.289.492.442	82.63
9	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**200,201,742**	**200,201,742**	**4.060.000**	2.03	541.481.152	66.63	1.289.492.442	82.63
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	174,995,642	174,995,642	**4.060.000**	2.32	170.935.642	97.68	170.935.642	97.68
	Sosialisasi, Komonikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25,206,100	25,206,100			25,206,100	100	25,206,100	100.00
10	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**485,492,590**							
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	174,790,750						174,790,750	100.00
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	32,425,900						94,830,000	100.00
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	94,830,000	94,830,000			94,830,000	100	94,830,000	100.00
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	34,912,800						34,912,800	100.00
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	29,890,000	29,890,000			29,890,000	100	29,890,000	100.00
	Penyusunan Rencana Kontijensi	99,506,640						99,506,640	100.00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19,136,500						19.136.500	100.00
11	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**755,000,000**	**405.288.200**	**250.313.500**	61.76	154.974.700	38.24	504.686.500	66.85
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	625,000,000	325.065.000	232.318.250	71.47	92.746.750	28.53	392.681.750	62.83
	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40,000,000	27.858.500	6.834.750	24.53	21.023.750	75.47	33.165.250	82.91
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	40,000,000	25.456.200	11.160.500	43.84	14.295.700	56.16	28.839.500	72.10
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	20,000,000	10.030.500			30,000,000	100	20,000,000	100.00

	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	30,000,000	16.878.000			16.878.000	100	30,000,000	100.00
12	**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**119,940,200**	**82.413.300**	**16.768.590**	20.35	65.644.710	79.65	103.171.610	86.02
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	19,972,800	19,972,800			19,972,800	100	19,972,800	100.00
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	64,997,400	34.005.500	2.235.000	6.57	31.770.500	93.43	62.762.400	96.56
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	34,970,000	28.435.000	14.533.590	51.11	13.901.410	48.89	20.436.410	58.44
Jumlah		**4,565,959,550**	**2.714.944.5620**	**1.339.374.212**	**49.33**	**1.375.570.348**	**50.67**	**3.226.585.338**	**70.67**

❖ Permasalahan dan Solusi terkait Penyerapan Anggaran

Tabel.28
Permasalahan dan Solusi

KODE KEGIATAN					PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN TERKAIT PENCAPAIAN KINERJA (SECARA TEKNIS BAIK FAKTOR INTERNAL MAUPUN FAKTOR EKSTERNAL)	PERMASALAHAN TERKAIT REALISASI KEUANGAN	SOLUSI
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
1	05				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	05	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA**			-
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, output sub kegiatan direncanakan pada triwulan II TA. 2023 sebanyak 1 dokumen dan telah terealisasi 1 dokumen yaitu dokumen renja pokok 2024 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 19.675.300, terdiri dari Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Honorarium Pejabat Perencana SKPD)Rp 4.500.000, belanja ATK sebesar Rp. 800.000, belanja Kertas Cover Rp 375.300 ,belanja cetak Rp 1.250.000, Belanja Bahan Komputer Rp 1.130.000 , dan belanja makan dan minum rapat Rp 3.150.000. Namun realisasi keuangan masih 24,40%. Terdapat SPJ makan minum rapat, perjalanan dinas yang belum di GU-kan senilai Rp 5.300.000 yang belum di GU-kan.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan.
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu sebanyak 2 dokumen, direncanakan pada Triwulan III TA. 2023		
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Target output sub kegiatan s.d triwulan II yaitu tersusunnya dokumen DPA-SKPD Tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 2.568.340, terdiri dari belanja ATK Rp 449.500, Belanja Kertas Cover Rp 261.840, belanja cetak Rp 1.200.000, dan Belanja Bahan Komputer Rp 657.000. Realisasi keuangan Rp 1.086.400 (42,30%). Terdapat SPJ senilai Rp 1.150.000 yang belum di GU-kan.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Target output sub kegiatan s.d triwulan II yaitu tersusunnya 6 dokumen yaitu LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Evaluasi Kinerja TW 4 TA. 2022, Laporan Evaluasi RKPD TW I TA. 2023 dan Laporan Kinerja Triwulan I TA. 2023 dengan capaiani kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 15.836.300, terdiri dari belanja ATK Rp 800.000, Belanja Kertas Cover Rp 476.300 belanja cetak Rp 1.400.000, Belanja Bahan Komputer Rp 1.500.000 ,belanja makan dan minum rapat Rp 3.250.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 8.410.000. Realisasi keuangan masih Rp. 5.007.200 (31,62%). Terdapat SPJ yang belum di GU-kan sebesar Rp 7.200.000 yang belum di GU-kan	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
1	05	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan sebanyak 16 org dan terealisasi hanya 12 org sehingga capaian kinerja 75 %. Hal ini disebabkan karena adanya jabatan struktural eselon III dan staf yang belum terisi	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 1.419.992.909 dan realisasi Rp 738.787.038 atau sebesar 52,03%. Terdapat sisa anggaran pada triwulan II yang cukup besar karena terdapat beberapa jabatan yang belum terisi sehingga berdampak pada realisasi keuangan	
1	05	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu. Target s.d triwulan II sebanyak 10 dokumen dan realisasi 10 dokumen yaitu Laporan Keuangan Tahun 2022 sebanyak 1 dok, Laporan Triwulanan 2 dok, Laporan Bulanan Bendahara 6 dok dan Laporan semester 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 21.081.200, terdiri dari belanja honor pengelola keuangan Rp 9.900.000, belanja ATK Rp 1.237.200, belanja kertas cover Rp 1.124.000, belanja cetak Rp 645.000, Belanja bahan komputer Rp 1.650.000,belanja makan dan minum rapat Rp 525.000 serta belanja jasa tenaga pelayanan umum Rp 6.000.000. Realisasi keuangan 72,68%. Realisasi yang tidak sesuai dengan target karena SPJ untuk pengelola keuangan yang belum diGU-kan sebanyak Rp 1.650,000-	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	**05**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**			
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dan target s.d triwulan II sebanyak 2 dokumen dan realisasi 2 dokumen dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 10.483.300, terdiri dari belanja honor pengurus barang Rp 6.300.000, belanja ATK Rp 452.300, Belanja kertas cover Rp 250.000, belanja cetak Rp 350.000, belanja bahan komputer Rp 461.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 2.670.000. Realisasi keuangan 59,52%. . Disediakan anggaran perjalanan dinas dalam rangka penyusunan laporan BMD, namun tidak realisasi karena penyusunan laporan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur.	Agar PPTK mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			

1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan, target pada triwulan II sebanyak 6 orang dan terealisasi 9 org (Workshop Aplikasi SIRUP 1 org, Aplikasi Gaji 2 org, Pelatihan Water Rescue 1 orang, Bimtek PRB 2 orang, Pelatihan Pusdalops 3 org) dengan capaian kinerja 150%. Capaian kinerja melebihi target karena pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan undangan ataupun pemanggilan peserta.	Disediakan anggaran kas pada triwulan I sebesar Rp 22.610.000, teridir dari belanja kontribusi bimtek Rp 10.000.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 12.610.000. Realisasi keuangan masih 50,02%. Terdapat SPJ senilai Rp 8.500.000 yang belum di GU-kan karena keterbatasan anggaran untuk perjalanan dinas bimtek.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
1	05	01	2.06	01	Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator out put sub kegiatan yaitu Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan sebanyak 8 jenis,namun belum terealisasi (0%),	Dan disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 6.312.500,- yaitu belanja komponen alat listrik, dan realisasi keuangan 0%. Hal ini karena kebutuhan akan alat listrik masih terpenuhi. Dan pada dasarnya penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Agar PPTK untek tetap melakukan identifikasi terkait kebutuhan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target sebanyak 20 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 18 jenis yaitu BBM operasional 1 jenis dan 17 jenis alat dan bahan kebersihan dengan persentase capaian kinerja 90%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan kantor	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 12.116.250, terdiri dari belanja BBM/Pelumas Rp 8.616.250 dan belanja alat dan bahan pembersih Rp 3.500.000. Realisasi keuangan Rp 11.103.000 atau sebesar 91,06%.	
1	05	01	2.06	05	Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan sebanyak 3 jenis setiap triwulan, dan terealisasi 100% yaitu cetak, jilid dan penggandaan	Disediakan anggaran kas pada triwulan I sebesar Rp 14.450.000, dan realisasi keuangan 11,71% , terdapat SPJ belanja baliho untuk papan himbauan sebesar Rp 9.000.000 yang masih dalam proses pencairan	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan, dan target s.d triwulan II sebanyak 30 expl dan realisasi 30 expl yaitu koran lokal 6 expl, koran nasional 6 expl, koran regional 18 expl dengan capaian kinerja 100%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 3.360.000, dan realisasi keuangan Rp 2.040.000 atau sebesar 60,71%, terdapat SPJ pembayaran koran untuk bulan juni yang belum diGU-kan tsebesar Rp 1.320.000	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan

1	05	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah tamu yang difasilitasi, dan target s.d triwulan II sebanyak 136 org dan terealisasi 135 org dengan capaian kinerja 99,26%	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 7.350.000, yaitu belanja makan minum tamu Rp 3.350.000 dan realisasi keuangan Rp 7.265.000 atau 98,84%	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti, target s.d triwulan II sebanyak 20 kali dan realisasi 28 kali, capaian kinerja 140%.	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 154.782.400, terdiri dari belanja jasa upah jasa sopir Rp 18.000.000 dan belanja perjalanan dinas Rp 136.782.400 dan realisasi keuangan 93,14%.	
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**			
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah mebel yang diadakan sebanyak 5 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan mebel direncanakan pada triwulan II TA. 2023, namun yang terealisasi baru 4 unit dengan capaian kinerja 80%	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 15.000.000 dan realisasi Rp 7.250.000 (48,33%), realisasi keuangan tidak sesuai target karena masih ada 1 unit pengadaan lemari yang belum direalisasikan	Agar PPTK segera merealisasikan pengadaan mebel (lemari) 1 unit sesuai dengan target yang direncanakan
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Peralatan/Mesin Lainnya yang diadakan sebanyak 6 unit. Berdasarkan anggaran kas maka Pengadaan BM. Pengadan Peralatan dan mesin direncanakan pada Triwulan II TA. 2023, namun saat ini tidak dapat direalisasikan karena harga di e-catalog lebih tinggi dari standar biaya masukan sehingga menunggu perubahan anggaran	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 30.000.000 namun realisasi keuangan masih 0%	Agar PPTK melakukan penyesuaian harga pada perubahan harga
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 1 unit. Berdasarkan anggaran kas, pengadaan bangunan parkir direncanakan pada triwulan III TA. 2023,		
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indikator sub kegiatan adalah Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan sebanyak 3 unit, dan berdasarkan anggaran kas direncanakan pada triwulan II TA. 2023 dan real;isasi 100% yaitu pengadaan AC 2 unit dan TV Monitor 1 unit	Disediakan anggaran kas pada triwulan II sebesar Rp 33.500.000 dan realisasi 33.100.000 (98,81%).	PPTK menyesuaikan realisasi anggaran pada saat perubahan
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			

1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan, dan target s.d triwulan II sebanyak 200 surat dan realisasi 140 surat dengan persentase capaian kinerja 70%. Capaian kinerja disesuaikan dengan jumlah surat yang dikeluarkan maupun yang diterima.	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 3.132.475,- terdiri dari belanja ATK Rp 1.150.560, belanja kertas cover Rp 469.915, belanja benda pos (materai) Rp 500.000 belanja bahan komputer Rp 912.000 dan belanja paket/pengiriman Rp 100.000 Dengan realisasi keuangan 15,96%. Terdapat SPJ yang belum di GU-kan senilai Rp 1.100.000 yang belum di GU-kan.	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan, dan target s.d triwulan II sebanyak 18 rekening dan realisasi 19 rekening yaitu Listrik BPBD 6 rek, Token Listrik 2 rek, Air kantor 6 rek, kartu halo 5 rek. Capaian kinerja sebesar 105,5%	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 31.210.344,- terdiri dari belanja Telepon Rp 4.100.000,- belanja air Rp 3.002.400,- dan belanja listrik Rp 24.007.944 .Realisasi keuangan Rp 17.855.853 atau 57,21%. Hal ini disebabkan terdapat SPJ bulan Juni yang belum di-GUkan	Agar PPTK segera merampungkan SPJ pertanggungjawaban keuangan untuk direalisasikan
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan sebanyak 2 orang setiap triwulan. Sedangkan realisasi pada triwulan II sebanyak 2 org dengan capaian kinerja 100%.	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 9.900.000,-.Terdiri dari pejabat pengadaan Rp 2.400.000 dan belanja honor upah jasa cleaning service honor Rp 7.500.000. Realisasi keuangan Rp 7.850.000 atau 79,29%. Realisasi kurang dari target karena honor pejabat pengadaan berlaku bulan Februari 2023 dan terdapat sisa anggaran gaji upah jasa celaning service yang seharusnya dianggarkan hanya 5 bulan tetapi dianggarkan 6 bulan	Agar PPTK mencermati peletakan anggaran kas setiap triwulan
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah**			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator out put sub kegiatan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 13 unit setiap triwulan dan realisasi pada triwulan II sebanyak 10 unit yaituRescue 1 unit, Hilux 1 unit, Truk Serbaguna 1 unit, Mobil Operasional TRC 1 unit dan motor 6 unit, dengan capaian kinerja 76,92%. Capaian kurang dari target disebabkan karena pemeliharaan kendaraan ini hanya dilakukan untuk kendaraan dinas yang memerlukan perbaikan.	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 52.200.000,- terdiri dari belanja jasa pemeliharaan kendaraan perorangan Rp 7.200.000,- belanja jasa pemeliharaan kendaraan penumpang Rp 45.000.000,-. Realisasi keuangan Rp. 49.955.000 atau 95,70%.	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target s.d triwulan II sebanyak 12 unit dan terealisasi 13 unit yaitu AC 1 unit, printer 3 unit, Laptop 2 unit, chainsaw 4 unit, Mesin Babat 1 unit, genset 2 unit, dengan persentase capaian kinerja 108,3%. Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kondisi	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 9.390.000,-belanja pemeliharaan genset Rp 2.250.000 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya Rp 2.750.000 dan belanja pemeliharaan personal komputer Rp 3.690.000. Realisasi keuangan 20,13%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi peralatan yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	

						peralatan.		
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator out put sub kegiatan adalah Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi setiap triwulan sebanyak 1 unit dan realisasi kinerja masih 100%. Pemeliharaan gedung kantor disesuaikan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan/pemeliharaan.	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 5.000.000,- Realisasi keuangan 20,36%. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kondisi gedung kantor yang memerlukan perbaikan.	Agar PPTK tetap mengidentifikasi kondisi gedung kantor
1	05	03			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**			
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal, target penyelesaian dokumen KRB pada Triwulan II, namun proses pelaksanaan sub kegiatan dimulai di triwulan I dan Triwulan II sampai saat ini masih dalam proses verifikasi draf SK Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Penyusun Dokumen di Bagian Hukum.	Disediakan Anggaran Kas pada Triwulan II sebesar Rp. 174.995.642,- realisasi keuangan 0%.	Mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan dengan target 250 org. Berdasarkan anggaran kas telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2023 sesuai dengan anggaran kas namun pertanggung jawabannya baru akan di GU kan pada awal bulan Juli 2023	Disediakan Anggaran Kas pada Triwulan II sebesar Rp. 25.206.100,- realisasi keuangan 0%.	Mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**			
1	05	03	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen RPB yang disusun sampai dinyatakan sah/legal, target penyelesaian dokumen RPB pada Triwulan IV.		

1	05	01	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan, dengan target sebanyak 50 orang. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan III TA. 2023		
1	05	01	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang diadakan dengan target 21 unit Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II TA. 2023 namun belum terealisasi, karena belum tersedia dalam e-catalog dan saat ini masih dikoordinasikan dengan pejabat pengadaan(UKPBJ	Disediakan anggaran kas triwulan II TA. 2023 sebesar Rp 94.830.000, namun belum terealisasi, karena belum tersedia dalam e-catalog dan saat ini masih dikoordinasikan dengan pejabat pengadaan(UKPBJ	
1	05	01	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk, dengan target sebanyak 2 desa. Berdasarkan rencana aksi, output sub kegiatan dicapai pada Triwulan III TA. 2023.		
1	05	01	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah Tim Reaksi Cepat yang di diklat, dengan target sebanyak 50 orang. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan direncanakan pada Triwulan II namun belum terealisasi karena penyesuaian kesediaan narasumber dan rencana akan dilaksanakan pada Minggu II bulan Juli 2023	Disediakan Anggaran Kas pada Triwulan II sebesar Rp. 29.890.000,- realisasi keuangan 0%.	Mencermati anggaran kas yang telah direncanakan serta pemenuhan target kinerja sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen renkon yang disusun sampai dinyatakan sah/legal, target penyelesaian dokumen renkon pada Triwulan IV T.A 2023		

1	05	01	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indikator output sub kegiatan adalah Jumlah warga negara yang ikut pelatihan dengan target 250 org. Berdasarkan anggaran kas maka sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV TA. 2023		
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**			
1	05	01	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa semua kejadian bencana yang terjadi pada bulan januari s.d Juni 2023 (207 kejadian), semuanya direspon kurang dari 24 jam ketika laporan diterima dan dilakukan kaji cepat.	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 325.065.000,- Terealisasi sebesar Rp. 232.318.250,- atau sebesar 71.47% dari target anggaran Triwulan II. Namun masih Terdapat SPJ Honor/Upah Kerja TRC periode bulan Juni 2023 sebesar Rp. 34.500.000-, SPJ makan minum Jaga TRC selama bulan Juni 2023 sebanyak Rp.12.960.00 ,- yang belum di GU-kan. dan SPJ Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah sebesar Rp 10.318.000,-dan SPJ Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan Komputer sebesar Rp 450.000,-. Jadi Total SPJ yang belum ter GU kan sebesar Rp. 58.228.000,- atau sebesar 17.91 % dari anggaran Kas	PPTK segera menyiapkan SPJ administrasi keuangan agar dapat segera terealisasi kinerja dan keuangan.
1	05	01	2.03	03	Pencarian,Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban laki-laki dan perempuan berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana bulan januari s.d Juni 2023 sebanyak 1190 jiwa (590 Laki-laki dan 600 Perempuan) dan semuanya diberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 27.456.000,- dengan realisasi sebesar Rp.6.834.750,- atau bsebesar 24.53%, Namun masih terdapat SPJ perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Belanja Bahan Bakar Minyak/pelumas yang belum di GU-kan sebesar Rp. .5.250.000,- .sehingga belum terealisasi sebesar 36,58 % dari target anggaran kas.	PPTK segera menyiapkan SPJ administrasi keuangan agar dapat segera terealisasi kinerja dan keuangan.
1	05	01	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Indikator output adalah Persentase jumlah korban bencana laki-laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya yang responsif gender dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa jumlah korban bencana pada bulan Januari s.d Juni 2023 sebanyak 1190 jiwa (590 Laki-laki dan 600 Perempuan) dan semuanya diberikan bantuan logistik baik itu berupa sandang pangan dan hunian sementara (tenda).	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 25.456.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.160.000.,- atau sebesar 43.84% dari target anggaran kas pada triwulan II. Namun masih terdapat SPJ perjalanan Dinas Luar Daerah dalam provinsi yang belum di GU-kan sebesar Rp. 9.312.000,- . Pada dasarnya anggaran kegiatan sifatnya disediakan dan disesuaikan dengan kejadian bencana.	PPTK segera menyiapkan SPJ administrasi keuangan agar dapat segera terealisasi kinerja dan keuangan.

1	05	01	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Indikator Output adalah Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa kooridnasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana pada bulan januari s.d Juni 2023 sebanyak 38 personil dan semuanya aktif dalam penanggulangan bencana	Disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 10.000.000,- Namun realisasi keuangan sampai pada triwulan II masih 0%, hal ini disebabkan karena anggaran sifatnya disediakan dan tidak terdapat kejadian bencana yang membutuhkan aktivasi sistem komando penanganan darurat.	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	05	01	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Indikator output adalah Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian luar biasa wabah penyakit dengan target 100% setiap triwulan dan terealisasi 100%. Dengan perhitungan bahwa bencana non alam (covid-19) yang ditangani oleh BPBD terkait giat pemulasaran jenazah covid-19, semuanya direspon kurang dari 24 jam. pada periode Triwulan II tidak ada Masyarakat yang terkonfirmasi covid-19 (meninggal) yang diterima oleh TRC BPBD.	Dan disediakan anggaran pada triwulan II sebesar Rp 16.878.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0,- hal ini disebabkan karena pada triwulan II tahun 2023 tidak ada kejadian akibat Covid 19 dan bencana wabah penyakit lainnya	PPTK melaksanakan sub kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**			
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota yang disusun sebanyak 3 dokumen. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan III TA. 2022		
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Forum PRB yang dibentuk dan difasilitasi sebanyak 1 Forum. Berdasarkan anggaran kas, sub kegiatan direncanakan pada Triwulan I TA. 2023, dan saat ini dan saat ini masih dalam tahap identifikasi stakeholder/Akademisi/Tokoh Masyarakat/Relawan yang akan dilibatkan dalam pembentukan Forum PRB ditingkat kabupaten	Disediakan anggaran kas sebesar Rp 34. 005.500 untuk pelaksanaan pembentukan Forum PRB dan realisasi keuangan masih 6.57%.	PPTK untuk segera melaksanakan pembentukan Forum PRB sesuai rencana aksi
1	05	01	2.02	07	*Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota*	Terget output sub kegiatan pada triwulan II yaitu tersusunnya dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%	Disediakan anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 28.435.000,- yang terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp 550.000, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 500.000,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 150.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 1.225.000,- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp26.010.000, Realisasi masih 55,88%, masih ada SPJ yg belum dipertanggungjawabkan seperti belanja makan dan minum, belanja	

							cetak dan penggandaan, sedangkan untuk perjalanan dinas telah dilakukan koordinasi ke BNPB terkait pengajuan proposal dana Hibah RR dan ke BBWS Jeneberang terkait rekomendasi teknis terhadap usulan rekonstruksi tanggul sungai Desa Lauwo Kec. Burau.	

BAB 4 PENUTUP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 1 sasaran pendukung yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, serta Rencana Strategis (Renstra) BPBD Tahun 2021-2026.

Secara umum hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pencapaian sasaran pada tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran belanja APBD Triwulan II TA. 2023 adalah sebesar Rp. 1.339.374.212,- (49,33%) yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 757.637.036,- (52,50%) dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 541.387.176,- (49,39%) dan Belanja Modal Rp 40.350.000,- (22,97%).
b. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis I dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Triwulan II TA. 2023 sebesar **97,77%** dengan ***predikat BAIK***.
c. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis II Indikator 1 yaitu Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Target Triwulan II TA. 2023 sebesar **100%** dengan realisasi **84,12% *predikat BAIK***
d. Persentase Capaian Kinerja sasaran strategis II Indikator 2 yaitu Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan bencana Daerah Triwulan II TA. 2023 sebesar **97,27%**, dengan ***predikat BAIK***.
e. Persentase Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana berdasarkan jenis pelayanan dasar yaitu :
   - Pelayanan Informasi Rawan Bencana : 66.53%
   - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana : 100%
   - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : 100%
f. Tindak lanjut atas rekomendasi dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 adalah :

- Dokumen Perencanaan Kinerja dan Laporan Kinerja telah di Publikasikan di Website BPBD
- Hasil pengukuran kinerja belum dapat dijadikan dasar pemberian penghargaan (reward) karena belum ada payung hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment.

g. Faktor yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Triwulan II TA. 2023 terhadap beberapa target sasaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur yaitu :

- Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa melalui E-Catalog
- Terdapat beberapa jabatan Struktural, fungsional penyetaraan dan jabatan pelaksana yang masih kosong, mempengaruhi realisasi belanja gaji dan tunjangan
- Keterlambatan PPTK dalam merampungkan administrasi pertanggungjawaban keuangan
- Pelaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
- Terdapat beberapa kegiatan yang sifatnya disediakan sehingga penggunaan anggarannya disesuaikan dengan kondisi atau kejadian bencana
- Pengolahan data dan informasi pada lingkup bidang yang belum maksimal
- Terdapat papan himbauan peringatan dini bencana yang rusak sehingga berdampak kepada capaian SPM Pelayanan informasi rawan bencana yang kurang dari 100%

h. Adapun rekomendasi terkait peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu ditindaklanjuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perjanjian kinerja secara berjenjang di tingkat SKPD
- Meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, organisasi masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan dalam rangka penanggulangan bencana.
- Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam KAK dan mengacu kepada anggaran kas yang telah ditetapkan.

- Pemasangan papan himbauan/peringatan dini bencana dibeberapa titik rawan bencana
- Memaksimalkan pengolahan data dan informasi lingkup OPD
- Mencermati /kegiatan yang sifatnya disediakan untuk mengatisipasi SILPA program diakhir tahun
- Memprioritaskan program/kegiatan pengampuh Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan Bencana
- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral terkait penanggulangan bencana

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja Triwulan II TA. 2023 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait pelaksanaan tugas fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga kontribusi BPBD dalam pembangunan dapat lebih dirasakan manfaatnya.

Malili, 10 Juli 2023

Plt. KEPALA PELAKSANA,

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

MASDIN, AP., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19730315 199311 1 001